BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Evaluasi Penyelenggaraan Program Raksa Desa Tahun 2003-2006 di Provinsi Jawa Barat

Laporan Akhir
(*Final Report*)

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PUBLIK
DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG, 2007

SUSUNAN PERSONALIA
PELAKSANA KEGIATAN

Tenaga Ahli Utama (S3) :

1. Prof. Judistira K. Garna, Ph.D
2. Prof. Dr. H. Dedi Rosadi, M.S

Tenaga Ahli (S2):

1. Dr. H. Dede Mariana, Drs., M.Si.
2. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., M.A.

Tenaga Ahli (S1):

1. R. Widya Setiabudhi, S.Si., S.IP., M.T.
2. Tjipto Atmoko, Drs., S.U.

Asisten Muda:

1. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.
2. Jenny Ratna Suminar, Dra., M.Si.

Enumerator/Surveyor:

1. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.
2. Dian Wardiana, Drs., M.Si.
3. Budi Utomo, S.IP., M.Si.
4. Moh. Ilham A. Hamuddy, S.IP., M.Soc.Sc.
5. Endang Supardi, Drs., M.Si.
6. Muhamad Iqbal, S.Pd.
7. Ari Ganjar, S.Sos.
8. Dedy Indra Gunadi, S.IP.
9. Satriya Wibawa, S.IP.
10. Hatta Saputra, Drs.
11. Basyrah Alwi, S.IP.
12. Ike Diyah Rusmaryanti, S.Sos.
13. Sendy Kristiani, S.IP.
14. Fajjin, S.Pd.
15. Ansyorillah, S.IP.
16. Aang Witarsa, S.Pd.

Operator komputer:

1. Eka Zulandari, Dra.
2. Windy Cahyaningsih, S.E.

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara terus menerus dan bekelanjutan guna meningkatkan kondisi yag lebih baik dan kondusif, terwujudya kehidupan masyarakat yang berdaulat, mandiri, memiliki daya saing, berkeadilan, sejahtera, maju serta memiliki kekuatan moral dan etika yang baik (*cageur, bageur, bener, pinter tur singer serta silih asih silih asuh*). Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang tidak terlepas dari tututan dan tantangan yang diterjemahkan dalam visi dan misi serta strategi Jawa Barat yang akseleratif tahun 2003-2008

Dalam rangka mewujudkan visi "Akselarasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat 2010", perlu dilakukan upaya berkesinambungan dan berkelanjutan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa pendekatan pembangunan daerah yang bertumpu pada pembangunan manusia merupakan suatu landasan untuk mewujudkan visi yang akan dituju. Pembangunan manusia adalah pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan sebagai alat pembangunan.

Mengingat pentingnya paradigma pembangunan manusia tersebut, di dalam Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat 2003 – 2008 dinyatakan bahwa indikator pencapaian visi Jawa Barat adalah Indeks Pembangunan Manusia yang pada tahun 2010 diharapkan mencapai nilai 80. Pengertiannya adalah Jawa Barat pada Tahu 2010 dapat mensejajarkan kualitas pembangunan Manusia pada kelompok daerah terkategorikan sejahtera.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah Desa. Karena itu di dalam salah satu kebijakan Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD Tahun 2003 ditetapkan kebijakan untuk mengarahkan pembangunan berbasis IPM kepada Desa. Dengan pertimbangan jika IPM Desa-Desa meningkat, maka akan meningkatkan pula IPM Kecamatan yang pada gilirannya IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi juga akan meningkat.

Program Raksa Desa dirancang dengan harapan desa dapat melaksanakan beberapa hal yang menjadi kewenangan dan kewajiban provinsi, diantaranya program pembantuan ini akan dapat mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dengan memberdayakan Pemerintah dan Masyarakat Desa melalui pendayagunaan Sumberdaya lokal secara mandiri dan sumber daya pembangunan secara optimal. Tetapi walaupun program Raksa Desa telah berjalan sejak Tahun 2003 sampai sekarang, keberadaanya tidak pernah diketahui oleh pemerintah provinsi, sehingga dalam kesempatan ini akan dilakukan penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan program Raksa Desa, khususnya dalam kaitan dengan dampaknya terhadap peningkatan daya beli masyarakat desa.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk mengetahui keberadaan tersebut maka dalam penelitian ini akan diuraikan identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas mekanisme penyaluran dana Raksa Desa?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan dana Raksa Desa untuk peningkatan perekonomian perdesaan?
3. Bagaimana efektivitas penggunaan dana Raksa Desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan?
4. Bagaimana efektivitas pemanfaatan dana Raksa Desa terhadap peningkatan daya beli masyarakat desa?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian adalah untuk melakukan kajian evaluasi terhadap efektivitas pemanfaatan dana Raksa Desa di Provinsi Jawa Barat selama periode 2003 – 2006. Secara rinci, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menganalisis efektivitas mekanisme penyaluran dana Raksa Desa.
2. Menganalisis efektivitas penggunaan dana Raksa Desa untuk peningkatan perekonomian perdesaan.
3. Menganalisis efektivitas penggunaan dana Raksa Desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Menganalisis efektivitas pemanfaatan dana Raksa Desa terhadap peningkatan daya beli masyarakat desa.

BAB

2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Mengenai Peneletian Sebelumnya

Salah satu studi akademis yang memfokuskan diri dalam evaluasi Program Raksa Desa adalah sebuah tesis yang dibuat oleh Elly Rustiny pada Program Magister Studi Pembangunan ITB (2005). Rustiny mengevaluasi pelaksanaan program Raksa Desa di Kabupaten Sumedang pada tahun 2003 dan tahun 2004. Penelitian Rustiny fokus untuk mengidentifikasi penyebab masalah yang ada pada pelaksanaan Program Raksa Desa di Kabupaten Sumedang tersebut dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya, berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat miskin mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan tahap pelaporan.

Penelitian Rustiny (2005) mendapatkan bahwa salah satu faktor keberhasilan Program Raksa Desa adalah efektifnya sosialisasi mengenai program tersebut yang dalam temuan Rustiny lebih efektif bila sosialisasi dilakukan secara informal. Selanjutnya Rustiny mengukur keberhasilan program melalui efektivitas *(effectiveness)*,efisiensi *(efficiency),*kecukupan *(adequacy),* pemerataan/ keadilan *(equality),* responsivitas *(responsiveness)* dan ketepatan *(appropriateness),* keberhasilan juga dianalisis secara makro terhadap pelaksanaan yang sudah berjalan tahun serta dihubungkan juga dengan tujuan dan sasaran program.

Rekomendasi Rustiny dalam penelitian tersebut adaalah perlunya melakukan pengkajian strategi pemberian bantuan maupun penentuan lokasi Desa, perlu adanya lembaga kontrol publik yang bersifat *independent*, selain laporan formal

perlu melakukan transparansi laporan kepada publik, meningkatkan kompetensi sarjana pendamping, membuat konsep strategi untuk keberlanjutan program, menetapkan indikator keberhasilan. Program jangka panjang antara lain, menciptakan lapangan kerja baik sektor formal maupun informal, memaksimalkan keterlibatan sektor swasta dalam berbagai bentuk kemitraan, serta meningkatan *social marketing* program Raksa Desa agar lebih dikenal dan didukung segenap aparatur pemerintah dan masyarakat Jawa Barat.

Program Raksa Desa menginginkan adanya perguliran dana bantuan, karena apabila dana pinjaman tersebut bergulir maka akan menimbulkan *spillover effect* sehingga semakin banyak masyarakat miskin yang mendapat bantuan melalui program ini.

Selain Program Raksa Desa ada juga beberapa program bantuan dana bergulir yang telah dilaksanakan, diantaraanya adalah Program Jaringan Pengaman Sosial seperti antara lain PDMDKE dan P2KP. Salah satu penelitian yang mengkaji efektivitas bantuan dana bergulir adalah kajian yang dilakukan LPM-UPI pada tahun 2003 di Kota Bandung. Rekomendasi penelitian tersebut meneyebutkan bahwa keberhasilan program sejenis ini harus ditunjang oleh adanya pembinaan dan pendampingan yang kontiniu apakah itu oleh LSM/Konsultan pendamping atau perguruan tinggi atau lembaga lainnya secara professional.

Terlepas dari belum efektif atau efisiennya program-program sejenis akan tetapi kedua penelitian di atas merekomendasikan agar program-program seperti Raksa Desa atau yang sejenisnya perlu dilanjutkan, karena program ini secara keseluruhan membantu kelompok masyarakat miskin yang terpuruk karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, sesuai dengan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan maka penetapan lembaga pelestari dana perlu memperhatikan aspirasi dan potensi social budaya setempat serta mekanisme pengawasannya terutama melalui peran organisasi masyarakat fungsional yang ada di desa/kelurahan.

2.2. Kajian Tentang Penyebab Kemiskinan

Berikut ini akan dipaparkan penyebab kemiskinan yang dikutip dari penelitian tentang kemiskinan oleh SMERU pada tahun 2003.

Mengingat kemiskinan bersifat multidimensi, maka penyebabnya juga bersifat multidimensi diantaranya karena

1. faktor bencana alam seperti kegagalan panen, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan dan lain sebagainya. Demikian juga kerusuhan sosial baik yang bersifat horisontal dan vertikal yang terjadi di beberapa lokasi seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Tengah, Maulu, Maluku Utara dan Papua.
2. etos kerja yang rendah
3. tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah
4. kualitas kesehatan rendah serta sebab struktur dan proses transaksi politik, ekonomi dan sosial budaya yang tidak adil dan memiskinkan.
5. pengaruh eksternal terhadap perekonomian, seperti krisis ekonomi yang diawali krisis moneter pada tahun 1997
6. kepemilikan aset yang rendah
7. terbatasnya akses terhadap modal dan faktor produksi
8. rendahnya kesempatan bekerja serta berusaha
9. terbatasnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana dasar seperti transportasi, komunikasi/informasi, pasar, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Biasanya masyarakat miskin tetap menjadi miskin karena ketidakberdayaan dan keterdiaman kelompok miskin itu sendiri, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan budaya. Dari segi ekonomi penyebab ketidakberdayaan dan keterdiaman ada tiga, yaitu: (a) terhambatnya mobilitas sosial ke atas; (b) rendahnya partisipasi dalam penentuan kebijakan publik; dan (c) rendahnya keterlibatan dalam kegiatan ekonomi.

Terhambatnya mobilitas sosial terutama disebabkan oleh: (1) terbatasnya pengembangan potensi diri dan (2) keterasingan sosial.

Terbatasnya pengembangan potensi diri disebabkan oleh: (a) kondisi kesehatan dan pendidikan rendah; (b) rendahnya motivasi pengembangan diri; dan (c) tertekannya kesadaran hak-hak dasar *consciousness*. Sedangkan keterasingan sosial disebabkan oleh: (a) melemahnya modal sosial; (b) menghilangnya kepercayaan sosial; dan (c) disfungsi kelembagaan lembaga sosial.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterlibatan dalam kegiatan ekonomi produktif adalah: (a) rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha; dan (b) berkurangnya kesempatan ekonomi/berusaha.

Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh: (1) terbatasnya kepemilikan produktif; (2) lemahnya sumberdaya modal usaha; (3) terbatasnya pasar dan informasi pasar kurang sempurna/asimetris; dan (4) rendahnya tingkat kewirausahaan sosial.

Sedangkan fakto-faktor yang mempengaruhi berkurangnya kesempatan ekonomi/berusaha adalah: (1) kepincangan distribusi kekayaan; (2) kecurangan praktek bisnis dan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partsipasi masyarakat dalam kebijakan publik adalah: (a) kurangnya representasi si miskin; dan (b) terbatasnya ruang publik. Kurangnya representasi si miskin disebabkan oleh: (1) lemahnya swa-organisasi; (2) kurang berkembangnya kepemimpinan kelompok; dan (3) lemahnya jejaring kaum miskin.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbatasnya ruang publik disebabkan oleh: (1) birokrasi terlalu berkuasa; (b) elit politik yang tidak responsif; dan (c) tata pemerintahan yang otokratis.

Kondisi dan penyebab kemiskinan yang telah diuraikan di atas merupakan kemiskinan obyektif, yaitu berdasarkan data dan informasi dari BPS atau institusi lainnya.

BAB

3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Merujuk kepada tujuan penelitian ini maka evaluasi penyelenggaraan Program Raksa Desa di Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2006 menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam terhadap *well-informed persons* (WIP's) atau orang-orang yang dianggap kompeten dalam penyelenggaraan Program Raksa Desa. *Well-informed persons* dalam penelitian ini adalah satlak Ekonomi, satlak sarana dan prasarana, bendahara, dan penanggung jawab, dua orang masyarakat penerima, serta masyarakat lainnya yang melakukan akutanbilitas program. Untuk melengkapi kedalaman analisis penelitian maka dilakukan juga pendekatan kuantitatif yaitu dengan menggunakan analisis statistik desktiptif yang berkenaan dengan objek kajian penelitian ini, untuk keperluan data analisis statistik deskriptif disampaikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan Program Raksa Desa.

3.2. Alasan Pemilihan Daerah Sampel Penelitian

Tingkat kelancaran pelaksanaan Program Raksa Desa bervariasi, sementara cakupan penelitian ini memiliki dimensi waktu dan daerah yang rentangnya demikian besar. Dari sisi waktu pelaksanaan, penelitian ini mengevaluasi 4 tahap penyaluran bantuan yaitu dari tahun 2003 hingga tahun 2006, dan mencakup 18 kabupaten/kota di Jawa Barat yang terdiri dari 3700 desa. Berdasarkan informasi berbagai media massa dan berdasarkan rekomendasi penelitian sebelumnya (Rustiny, 2005) yang merekomendasikan agar evaluasi Program Raksa Desa yang meliputi seluruh wilayah Jawa Barat menggunakan metode

sampling klaster dalam penentuan sampelnya, dimana klasternya merupakan wilayah Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I sampai dengan IV di Jawa Barat, maka penelitian ini menetapkan bahwa pemilihan daerah penelitian akan dilakukan berdasarkan klaster Bakorwil. Berikut ini adalah daerah pemilihan yang dijadikan lokasi penelitian.

Tabel 3.1. Daerah Penelitian

Bakorwil	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa
Cirebon	Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka	Kecamatan Lemah Abang dan Kecamatan Jatiwangi	**Cirebon:** Belawa, Picung Pugur, Sindang Laut, Tuk Karangsuwung, Wangkelang (2003); Asem, Serajaya (2004); Cipeujeuh Kulon, Cipeujeuh Wetan (2005); Lemah Abang Kulon, Leuwidinding (2006) **Majalengka** Cibentar, Loji, Jatiwangi, Surawangi **(2003);** Ciborelang, Burujul Kulon, Jatisura, Leuweung Gede (2004); Burujul Wetan, Sukaraja wetan, Mekarsari, Cicadas **(2005);** Sutawangi, Andir (2006)

Priangan	Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut	Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Malangbong	**Bandung:** Ciptaharja, Cipatat, Citatah, Gunungmasigit (2003); Cirawa Mekar, Kertamukti, Sarimukti, Nyalindung, Sumur Bandung (2004); Mandalawangi, Mandalasari (2006) **Garut:** Sakawayana, Mekarasih, Cilampuyang, Cisitu, Sekarwangi (2003); Barudua, Karangmulya, Sanding, Sukarasa, Kutanagara (2004); Kewobaru, Cinagara, Citreas, Campaka, Sukamanah (2006)
Bogor	Kabupaten Bogor	Kecamatan Ciampea	Cibanteng, Bojong Jengkol, Tapos I, Gunung Malang, Cinangka (2003); Tapos II, Cibitung Tengah, Benteng, Cihideung Ilir, Cihideung Udik (2004); Ciampea, Tegal Waru, Cibadak (2005); Ciampea Udik,

			Bojong Rangkas, Cicadas, Cibuntu (2006)
Purwakarta	Kabupaten Subang	Kecamatan Jalan Cagak	Cibeusi, Cibitung, Curug rendeng, Sarireja, Kasomalang Kulon, Bunihayu (2003); Ciater, Cisaat, Nagrak, Sanca, Cimanglid, Kumpay, Tambakan (2004); Palasari, Kasomalang Wetan, Jalancagak (2005); Tambakmekar (2006)
Jumlah Total	6 Kabupaten	6 Kecamatan	60 desa

Di setiap desa ada 7 (tujuh) responden yang menjadi sumber data, yaitu satlak Ekonomi, satlak sarana dan prasarana, bendahara, dan penanggung jawab, 2 masyarakat penerima, serta masyarakat lainnya yang melakukan akutanbilitas program, maka total responden dalam penelitian ini sebanyak 420 orang responden. Kuesioner penelitian diberikan kepada:

1. Ketua Satlak
2. Bendahara
3. Satlak Ekonomi
4. Satlak sarana dan prasarana fisik
5. Masyarakat penerima (2 responden)
6. Akuntanbilitas program (1 tokoh masyarakat)

3.3. Teknik Pengolahan Data

Data primer hasil pengisian kuesioner akan diolah dengan menggunakan statistik deskriptif). Analisis statistik deskriptif dibuat guna memberikan gambaran yang memadai mengenai objek kajian yaitu pelaksanaan Program Raksa Desa.

Selain itu data hasil wawancara dan diskusi dengan *well-informed persons* didiskusikan lebih lanjut dalam sebuah *focus group discussion* diantara para peneliti, pemerhati, pembuat kebijakan yang terkait dengan Program Raksa Desa sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari pelaksanaan Program Raksa Desa.

3.4. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan yang rincian kegiatannya diberikan berikut ini.

Tabel 3.2. Jadwal Waktu Penelitian

Kegiatan	**Bulan**		
	1	**2**	**3**
Persiapan			
a. Penelahaan Literatur			
b. Perumusan Masalah			
c. Penyusunan Proposal Penelitian			
Kegiatan Penelitian			
a. Penyusunan Kuesioner Penelitian			
b. Pengumpulan data survai			
c. Entry data			
d. Pengolahan dan tabulasi data			
e. Analisis Data Hasil Penelitian			

Pelaporan			
a. Penulisan Laporan			
b. Penjilidan dan Kompilasi			
c. Seminar laporan			

BAB

4

TEMUAN PENELITIAN

4.1. Deskripsi Temuan

Tujuan dari program Raksa Desa adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui bekerjanya 3 (tiga) komponen masukan, yaitu dana untuk kegiatan usaha ekonomi sebesar Rp 60 Juta, dana untuk kegiatan prasarana fisik sebesar Rp 40 Juta serta pendampingan yang diwakili oleh Sarjana Pendamping yang merupakan tenaga teknis di lapangan (Nuriana, 2003). Menurut panduan program, masyarakat miskin dianggap berdaya bila mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha bersama dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi.

Hasil penelitian dapat dipilah menjadi dua bagian. Bagian Pertama akan menggambarkan secara kualitatif perkembangan Program Raksa Desa di tiap-tiap kabupaten yang menjadi objek kajian (sampel penelitian).

Bagian kedua akan menggambarkan statistik deskriptif dari proses pemberian bantuan Program Raksa Desa (mulai dari gambaran mengenai variabel input, proses, output, benefit dan dampak dari diselenggarakannya Program Raksa Desa) secara keseluruhan, yaitu dari total seluruh sampel penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh sebagian besar merupakan persepsi responden terhadap variabel-variabel tersebut di atas

4.1.1. Deskripsi Variabel Input

Bagian pertama dari variabel input adalah berkenaan informasi mengenai akan datangnya Program Raksa Desa kepada masyarakat. Sebagai catatan pengingat, bantuan Program Raksa Desa merupakan paket yang terdiri dari tiga komponen yaitu bantuan untuk pembangunan infrastruktur fisik (40%), bantuan bidang ekonomi (60%) dan penyertaan tenaga sarjana pendamping. Berkenaan dengan bagaimana informasi mengenai program diterima masyarakat, maka diperoleh gambaran sebagai berikut.

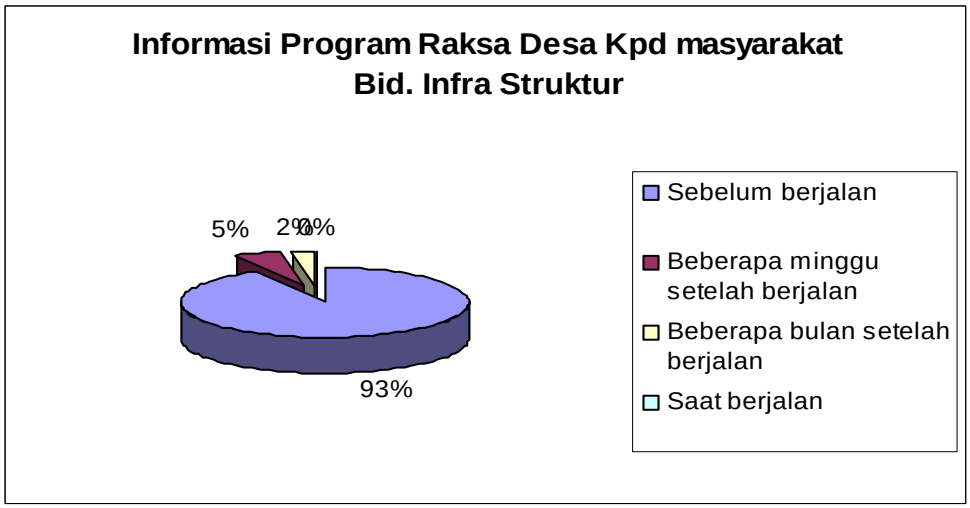

Grafik di atas menggambarkan bahwa 93% responden menyatakan mengetahui mengenai Program Raksa Desa pada saat sebelum program berjalan, 5% menyatakan mengetahui beberapa minggu setelah program berjalan, 2% menyatakan mengetahui beberapa bulan setelah program berjalan.

Bagian kedua dari variabel input adalah berkenaan dengan sasaran program pembangunan infrastruktur. Hasilnya diperoleh sebagai berikut.

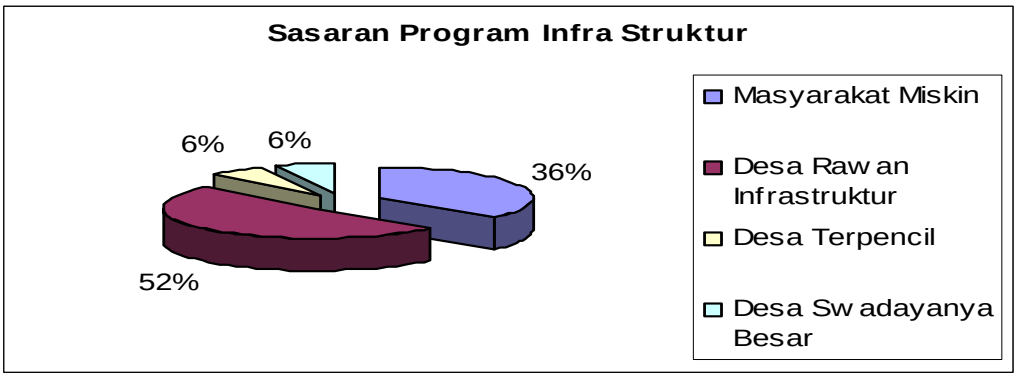

Grafik di atas menggambarkan bahwa 52% pembangunan infrastruktur dilaksanakan untuk desa yang rawan kelengkapan infrastrukturnya, 36% untuk desa yang memiliki kelompok masyarakat miskin cukup besar jumlahnya, dan masing-masing sebesar 6% diberikan kepada desa terpencil dan memiliki tingkat swadaya yang besar.

Sedangkan sasaran untuk bidang ekonomi (yang 60%) dapat digambarkan sebagai berikut.

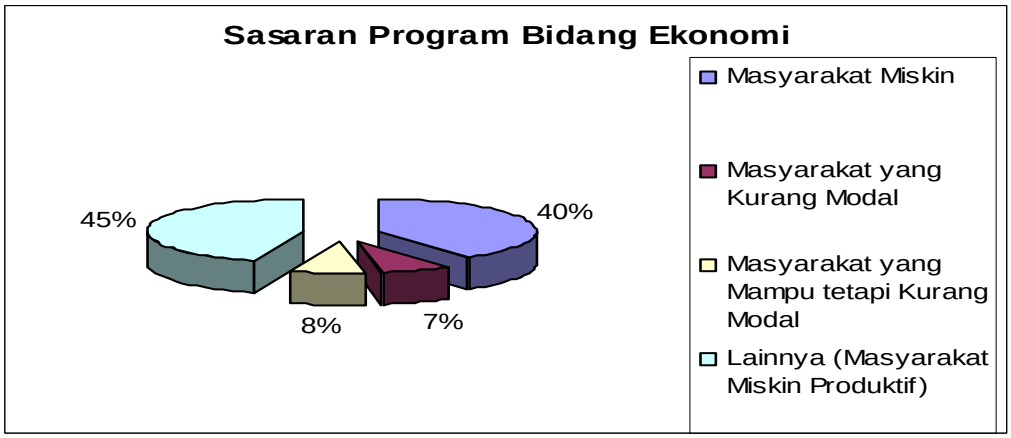

Grafik di atas menggambarkan bahwa 45% sasaran bantuan ekonomi kepada kelompok masyarakat miskin produktif , 40% untuk Masyarakat Miskin, 8% untuk Masyarakat yang Mampu tetapi Kurang Modal dan 7% untuk kelompok Masyarakat yang Kurang Modal

Hasil selanjutnya adalah gambaran mengenai besaran swadaya yang diberikan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

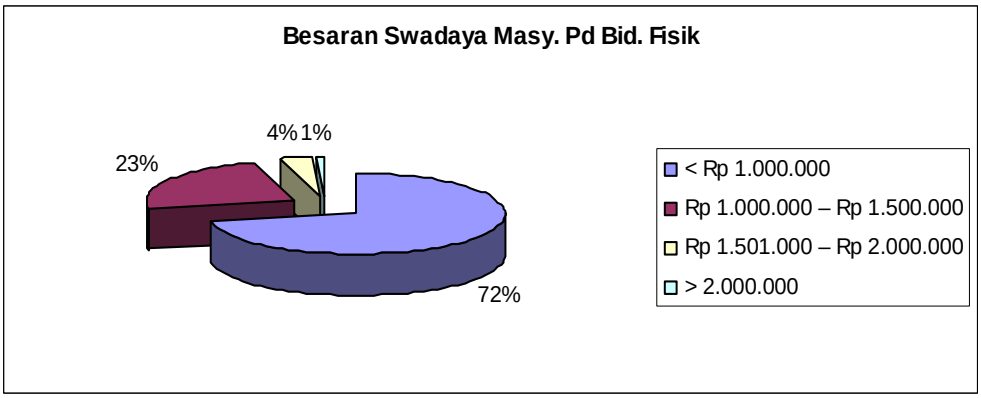

Grafik di atas menggambarkan 72% besaran swadaya masyarakat senilai kurang dari satu juta rupiah, selanjutnya 23% senilai antara Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 ada, 4% memberikan swadaya senilai antara Rp 1.501.000 – Rp 2.000.000, dan sebanyak 1% memberikan swadaya lebih besar daripada Rp.2 juta.

Sedangkan gambaran mengenai besarnya modal pinjaman responden (individu) adalah sebagai berikut.

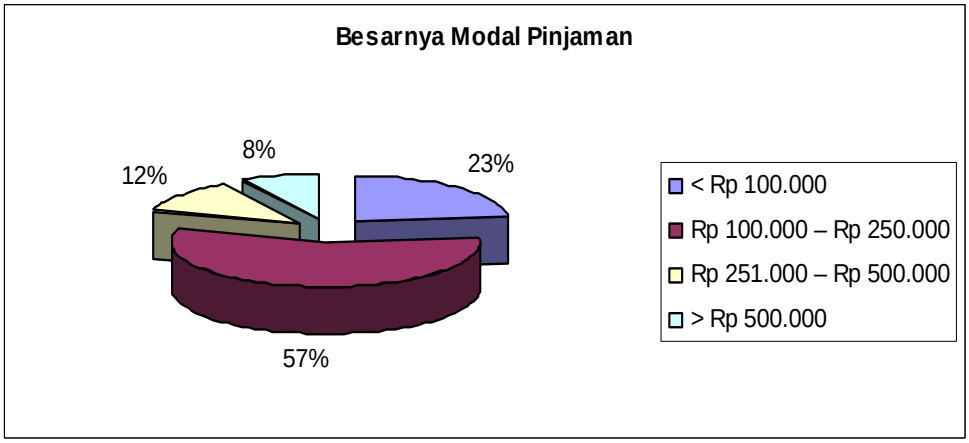

Grafik di atas menggambarkan bahwa 8% responden mendapat modal pinjaman sebesar lebih dari Rp 500.000, dan sebanyak 23% mendapat modal pinjaman sebesar kurang daripada Rp 100.000, sebanyak 12% mendapat modal pinjaman sebesar antara Rp 251.000 – Rp 500.000 serta sebanyak 57% mendapat modal pinjaman sebesar Rp 100.000 – Rp 250.000.

4.1.2. Deskripsi Variabel Proses

Keberhasilan pencapaian tujuan Program Raksa Desa ditentukan oleh bagaimana proses pelaksanaan program tersebut. Berikut ini deskripsi dari beberapa faktor yang menggambarkan bagaimana proses bantuan Program Raksa dilaksanakan.

Faktor pertama adalah gambaran mengenai partisipasi anggota kelompok atau warga dalam pembangunan infrastruktur fisik dalam kegiatan pertemuan anggota kelompok. Hasilnya diperoleh gambaran sebagai berikut.

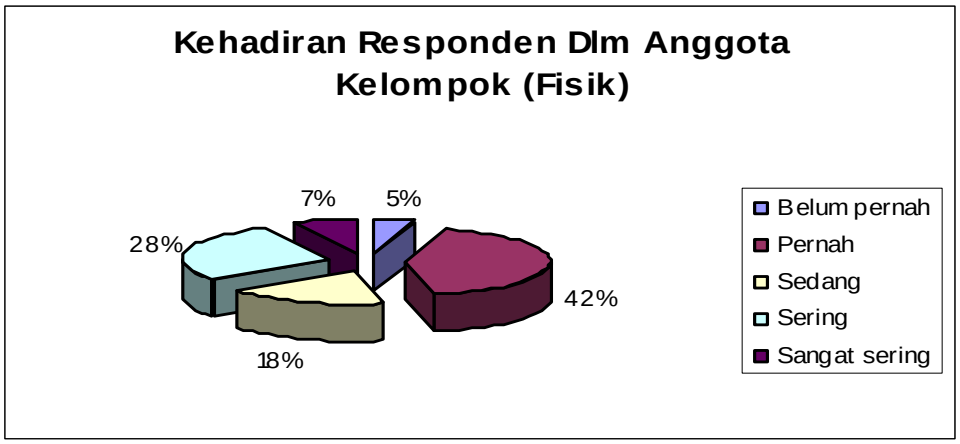

Dari grafik terlihat bahwa 42% responden menyatakan pernah menghadiri pertemuan kelompok dalam implementasi pembangunan infrastruktur fisik. Selanjutnya sebanyak 28% responden menyatakan sering menghadiri pertemuan kelompok, 18% menyatakan frekuensinya dalam menghadiri pertemuan kelompok adalah sedang-sedang saja, 7% menyatakaan sering menghadiri pertemuan kelompok dan sebanyak 5% menyatakan belum pernah menghadiri pertemuan kelompok.

Berikutnya gambaran mengenai partisipasi responden dalam mengajukan usul/saran dalam rapat-rapat pembangunan infrastruktur (bidang fisik). Hasilnya sebagai berikut.

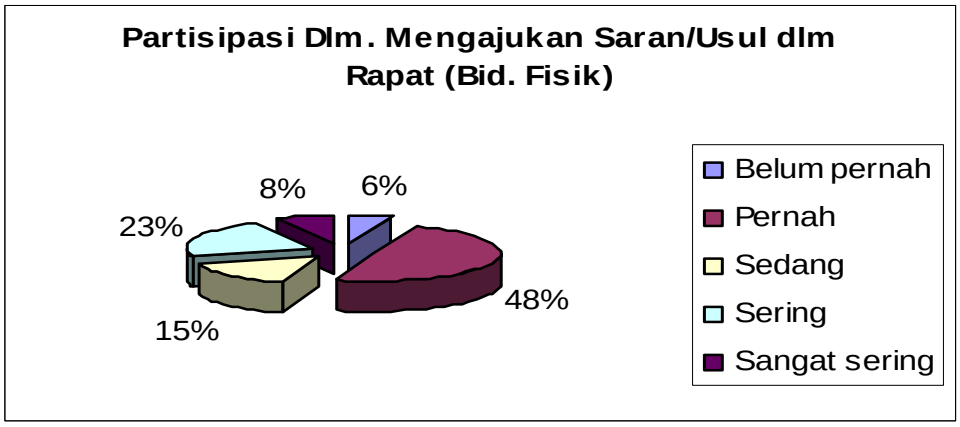

Dari grafik terlihat bahwa 48% responden menyatakan pernah mengajukan usul/saran. Selanjutnya sebanyak 23% responden menyatakan sering mengajukan usul/saran, 15% menyatakan frekuensinya dalam mengajukan usul/saran adalah sedang-sedang saja, 8% menyatakaan sering mengajukan usul/saran dan sebanyak 6% menyatakan belum pernah mengajukan usul/saran.

Berikutnya gambaran mengenai bagaimana informasi mengenai program raksa desa kepada masyarakat untuk bidang ekonomi. Hasilnya adalah sebagai berikut.

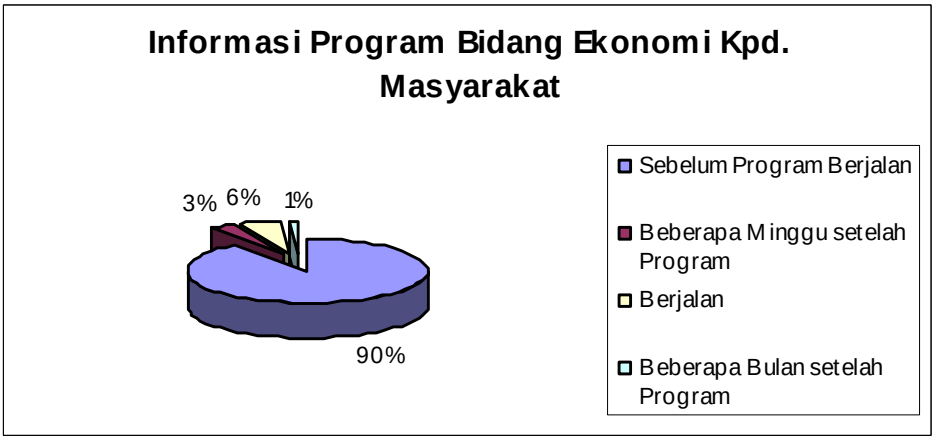

Dari grafik terlihat bahwa 90% responden menyatakan mengetahui adanya program bantuan Raksa Desa bidang ekonomi sebelum program berjalan, sebanyak 6% responden menyatakan mengetahui saat program sedang berjalan, 3% menyatakan mengetahui beberapa minggu setelah program berjalan dan

sebanyak 1% menyatakaan mengetahui adanya program beberapa bulan setelah program berjalan.

Berikutnya gambaran mengenai bagaimana para responden menghadiri pertemuan anggota kelompok untuk bidang ekonomi. Hasilnya adalah sebagai berikut

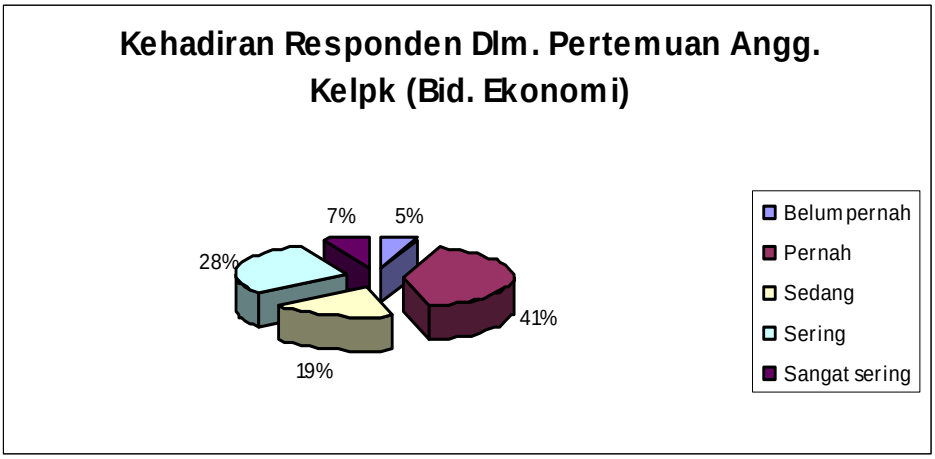

Dari grafik terlihat bahwa 41% responden menyatakan pernah menghadiri pertemuan anggota kelompok bidang ekonomi, 28% menyatakan sering menghadiri pertemuan, 19% menyatakan sedang-sedang saja frekuensi kehadirannya dalam pertemuan, 7% menyatakan sangat sering menghadiri pertemuan dan 5% menyatakan belum pernah menghadiri pertemuan anggota kelompok.

Berikutnya gambaran mengenai partisipasi responden dalam mengajukan usul/saran dalam rapat-rapat bidang ekonomi. Hasilnya sebagai berikut.

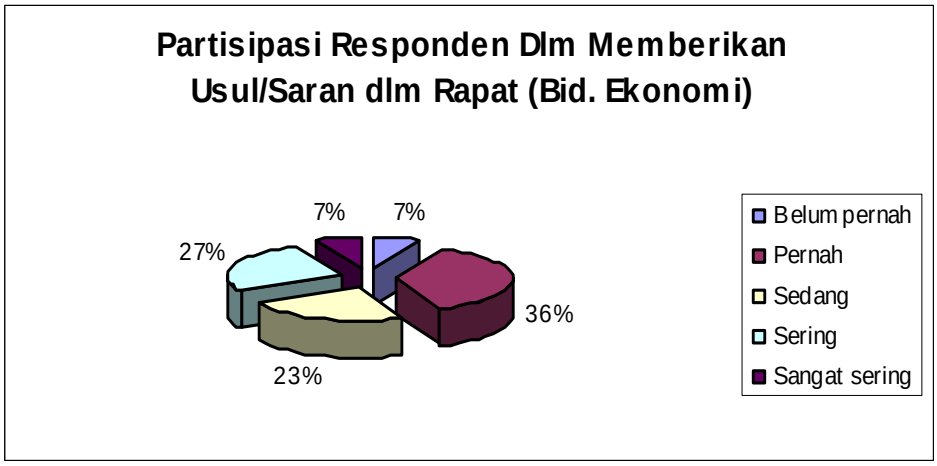

Dari grafik terlihat bahwa 36% responden menyatakan pernah mengajukan usul/saran. Selanjutnya sebanyak 27% responden menyatakan sering mengajukan usul/saran, 23% menyatakan frekuensinya dalam mengajukan usul/saran adalah sedang-sedang saja, 7% menyatakaan sering mengajukan usul/saran dan sebanyak 7% menyatakan belum pernah mengajukan usul/saran.

Berikutnya ini gambaran yang cukup signifikan untuk mengevaluasi keberhasilan program Raksa Desa untuk bidang ekonomi, yaitu seberapa besar motivasi responden untuk menggulirkan modal pinjaman, yang diantaranya bisa dilihat dari tingkat kerajinan responden dalam mencicil pinjaman. Hasilnya diperoleh sebagai berikut.

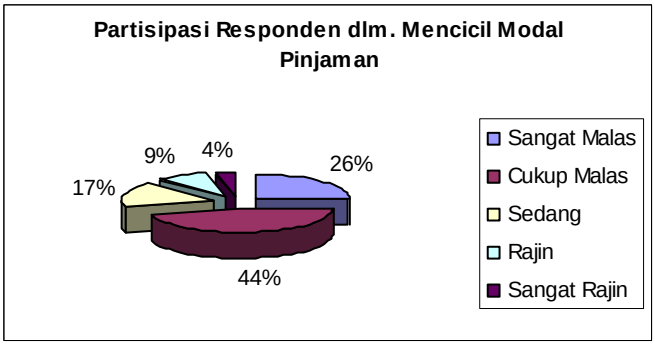

Dari grafik terlihat bahwa 44% responden menyatakan cukup malas untuk mencicil modal utang pinjaman modal dan sebanyak 26% menyatakan sangat

malas dalam mencicil pinjaman serta 17% responden menyatakan sedang-sedang saja tingkat kerajinannya dalam mencicil pinjaman. Sedangkan responden yang menyatakan sangat rajin dalam membayar cicilan hanya sebanyak 4% dan yang menyatakan rajin dalam mencicil pinjaman sebanyak 9%.

Gambaran berikut ini juga cukup menentukan keberhasilan program, yaitu sejauh mana responden terlibat untuk mengawasi sistem pelaporan dari Pengurus Pokmas kepada Kepala Desa. Hasilnya sebagai berikut.

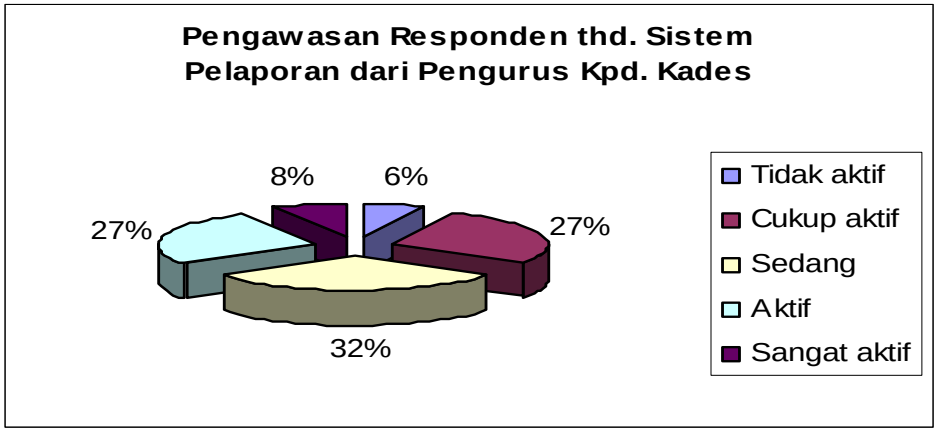

Dari grafik terlihat bahwa 32% responden menyatakan sedangp-sedang saja partisipasinya dalam mengawasi pelaporan kegiatan, 27% masing-masing menyatakan aktif dan cukup aktif melakukan kegiatan pengawasan, 8% menyatakan sangat aktif dan sebanyak 6% menyatakan tidak aktif dalam melakukan kegiatan pengawasan.

4.1.3. Deskripsi Variabel Output

Selanjutnya dapat kita lihat apakah output dari Program Raksa Desa ini sudah sesuai dengan tujuannya atau belum. Adapun output yang dapat digambarkan berdasarkan pengamatan di lapangan adalah sebagai berikut.

Gambaran output yang pertama adalah berkenaan dengan jenis prasarana fisik apa yang dapat dibangun melalui bantuan Program Raksa Desa, hasilnya dapat dilihat pada grafik berikut.

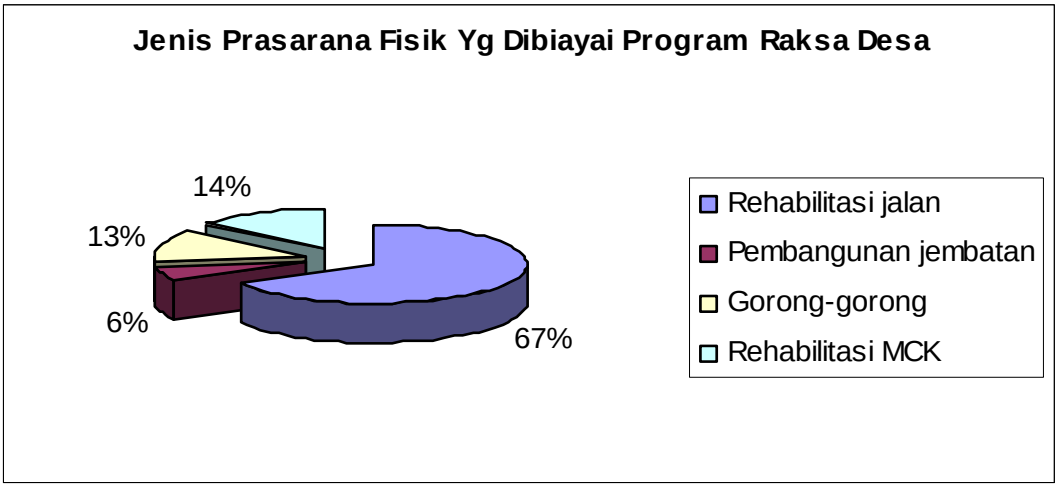

Grafik menunjukkan bahwa 67% infrastruktur fisik yang dibangun adalah rehabilitasi jalan desa, selanjutnya sebanyak 14% untuk merehabilitasi sarana MCK, dan 13% digunakan untuk memperbaiki gorong-gorong serta sebanyak 6% menggunakannya untuk pembangunan jembatan.

Sedangkan gambaran jenis kegiatan ekonomi yang dibantu permodalannya melalui program Raksa Desa adalah sebagai berikut.

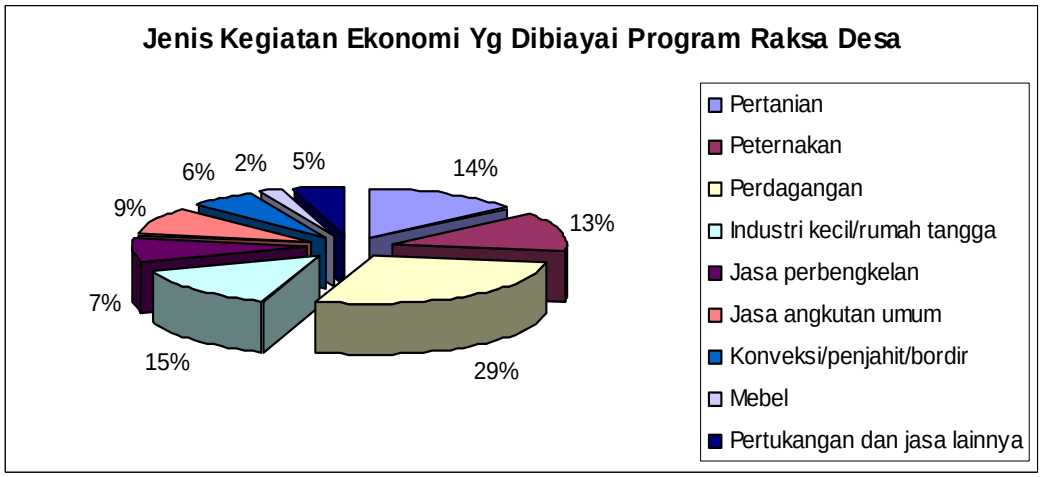

Grafik menunjukkan 29% jenis usaha yang dikembangkan adalah perdagangan, 15% bidang industri kecil/rumah tangga, 14% bidang pertaanian, 13% bidang peternakan, 9% bidang jasa angkutan umum, 7% bidang perbengkelan, 6% bidang konveksi/penjahit/bordir, 5% bidang pertukangan dan jasa lainnya dan 2% bidang mebel.

4.1.4. Deskripsi Variabel Benefit

Selanjutnua juga ingin dilihat sejauh mana manfaat/benefit yang diperoleh masyarakat atas adanya Program Raksa Desa. Untuk melihat seberapa besar manfaat yang diperoleh maka dapat digambarkan hasil pengamatan di lapangan seperti berikut.

Salah satu jalur kepada pengentasan kemiskinan adalah terbuka asksesibilitas warga desa ke luar atau menuju pasar. Untuk tujuan itulah Program Raksa Desa juga ditujukan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Berikut ini gambaran mengenai aksesibilitas transportasi setelah kegiatan infrastruktur selesai dibangun.

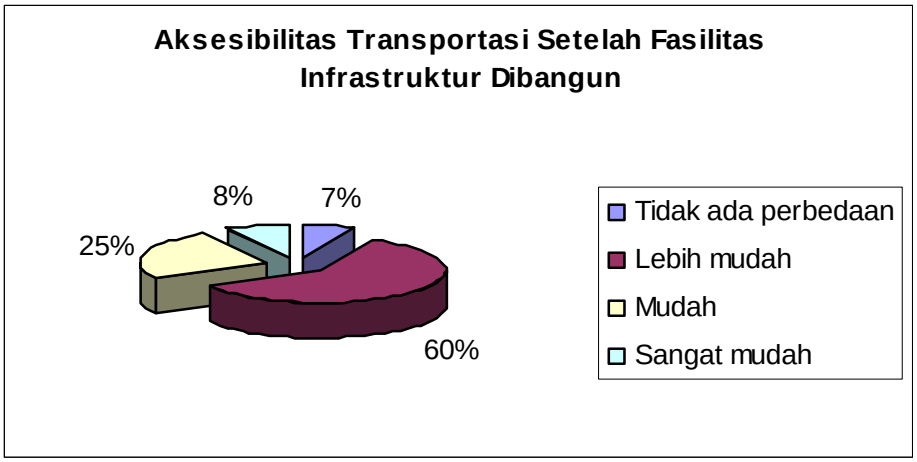

Sebanyak 60% responden menyatakan aksesibilitas transportasi menjadi lebih mudah setelah fasilitas infrastruktur dibangun, 25% menyatakan menjadi mudah, 8% menyatakan menjadi sangat mudah dan sebanyak 7% menyatakan tidak ada perubahan kemudahan aksesibilitas sekaalipun fasilitas telah dibangun.

Gambaran berikutnya adalah berkenaan manfaat yaang diperoleh individu atau kelompok yang mendapat bantuan ekonomi berupa pinjaman modal, di sini akan dilihat apakah responden mendapatkan keuntungan (laba) atau tidak setelah mendapatkan bantuan modal. Hasilnya dapat dilihat pada grafik berikut.

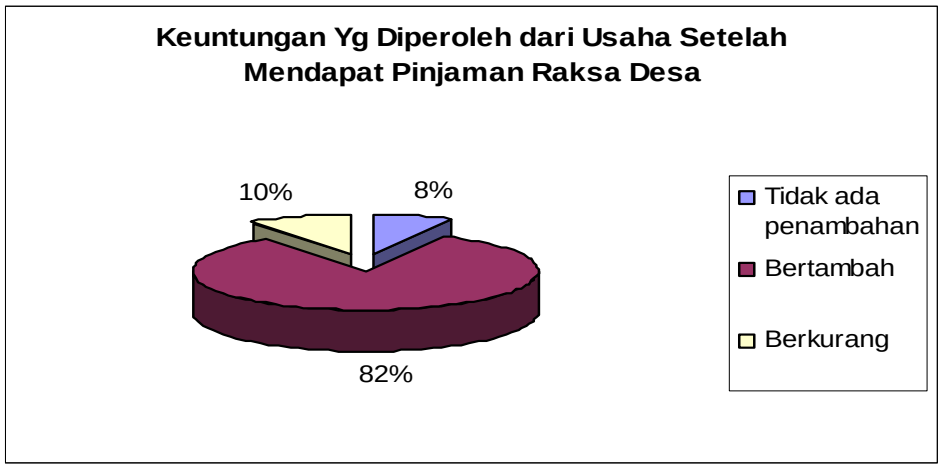

Grafik menunjukkan bahwa 82% responden menyatakan ada pertambahan laba, 10% menyatakan malah berkurang labanya, dan sebanyak 8% menyatakan tidak ada pertambahan laba usaha.

Berikutnya gambaran mengenai volume produksi barang yang dihasilkan setelah mendapat pinjaman dana Raksa Desa. Hasilnya sebagai berikut.

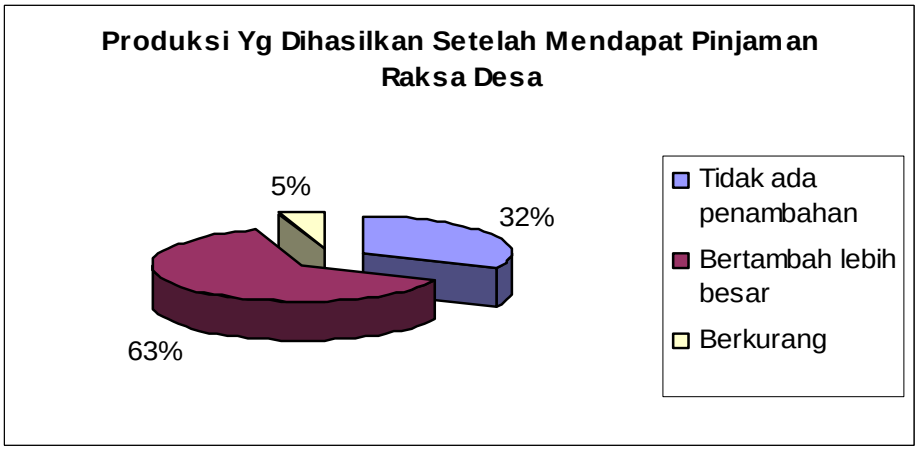

Dari grafik terlihat bahwa sebanyak 63% responden menyatakan bahwa produksinya bertambah, sebanyak 32% menyatakan tidak ada penambahan volume produksi dan sebanyak 5% menyatakan volume produksinya justru berkurang.

Selanjutnya juga akan dilihat apakah jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha meningkat setelah mendapat pinjaman program Raksa Desa.

Peningkatan jumlah tenaga kerja mengindikasikan adanya penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan daya beli. Hasilnya sebagai berikut.

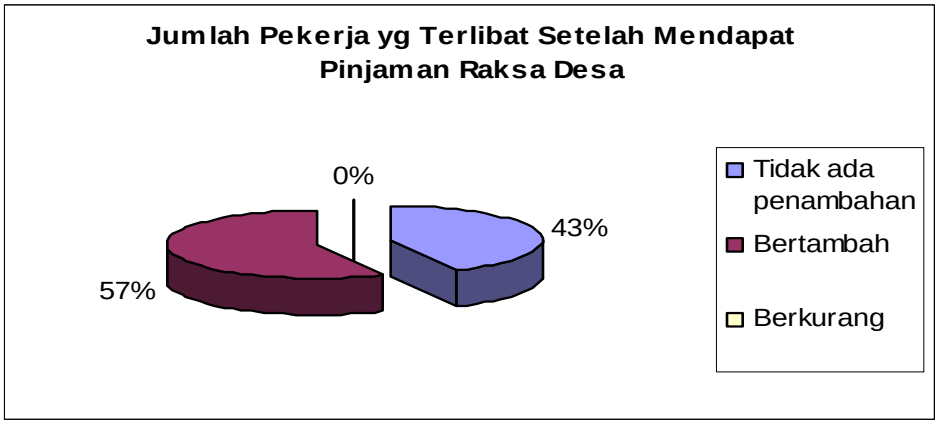

Dari grafik terlihat bahwa sebanyak 57% responden menyatakan bahwa ada peningkatan jumlah tenaga kerja, sebanyak 43% menyatakan tidak ada penambahan dan tidak ada yang menyatakan adanya pengurangan tenaga kerja (PHK) pasca Program Raksa Desa.

Unsur manfaat lain yang dapat digambarkan adalah penambahan jumlah kelompok masyarakat yang menerima dana perguliran Raksa Desa. Perguliran merupakan tujuan yang sebenarnya ingin dicapai melalui program ini. Hasilnya adalah sebagai berikut.

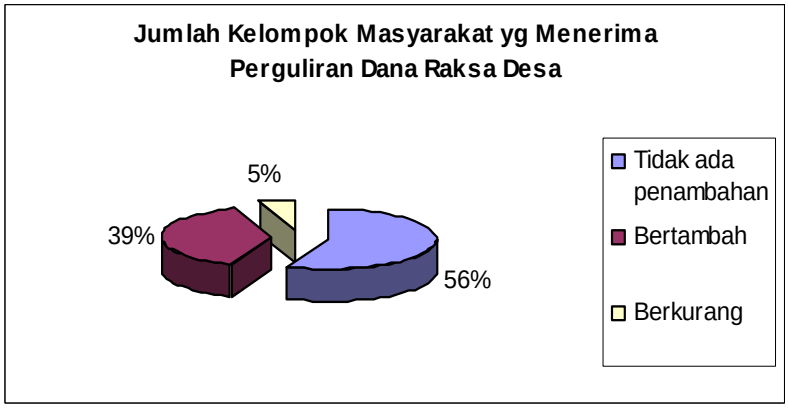

Dari grafik tampak bahwa 56% responden menyatakan tidak ada pernambahan jumlah kelompok masyarakat yang menerima perguliran Program Raksa Desa dan hanya 39% responden menyatakan ada penambahan jumlah kelompok masyarakat yang menerima perguliran Program Raksa Desa dan 5% menyatakan jumlah perguliran modal berkurang.

4.1.5. Deskripsi Variabel Dampak

Tujuan akhir dari pelaksanaan Program Raksa Desa adalah memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kemampuan daya beli waarga sehingga pada akhirnya akan mengunngkit pencapaian IPM khususnya bidang daya beli. Hasil penelitian mendapatkan gamabaran sebagai berikut.

Dampak pembangunan insfrastruktur terhadap keterpencilan tempat tinggal dapat dilihat dari grafik berikut.

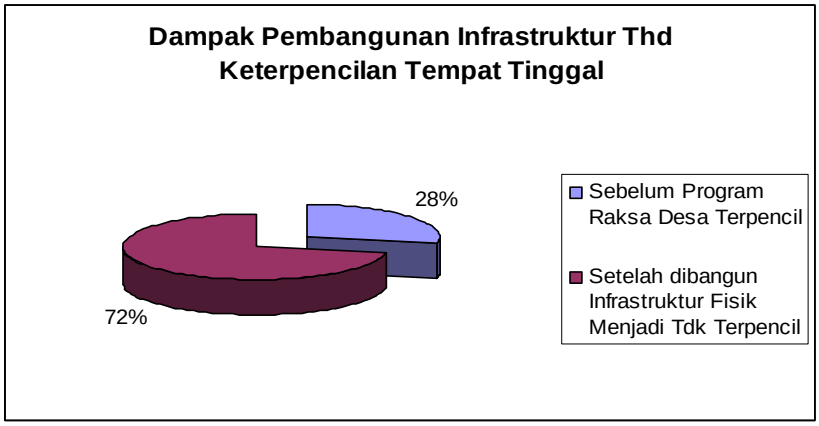

Grafik di atas menunjukkan bahwa 72% responden menyatakan bahwa tempat tinggalnya menjadi tidak terpencil setelah dibangun infrastruktur penunjang sebagai hasil dari Program Raksa Desa.

Bantuan modal untuk kegiatan ekonomi juga diharapkan dapat mendorong peningkatan status kepemilikan tempat tinggal, sehingga hal tersebut mengindikasikan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut.

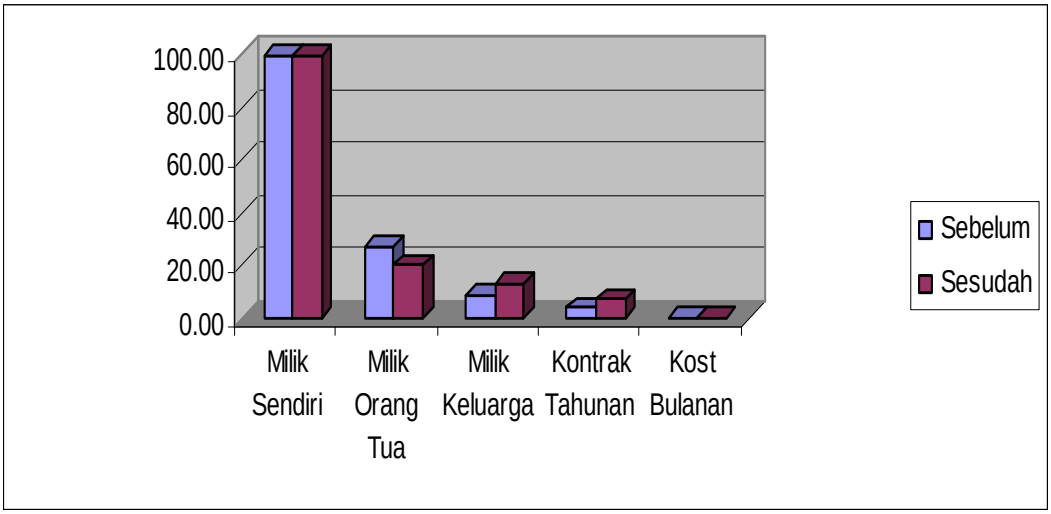

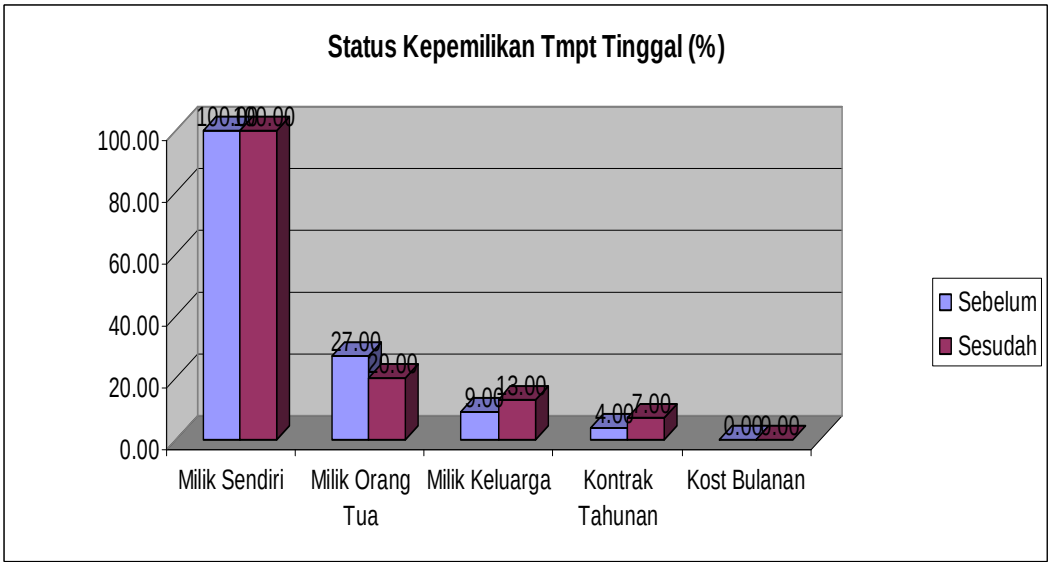

Grafik di atas menunjukkan bahwa status kepemilikan tempat tingga tidak banyak berubah baik sebelum maupun sesudah mendapat pinjaman modal.

Selanjutnya *soft indicators* dari kemiskinan dapat dilihat dari dua kebiasaan berikut, berhutang dan menjual atau menggadaikan barang miliknya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut ini akan ditampilkan gambaran kedua perilaku masyarakat/responden baik sebelum maupun sesudah mendapatkan bantuan pinjaman modal dari Program Raksa Desa. Untuk kebiasaan berhutang dapat dilihat dari tiga grafik berikut.

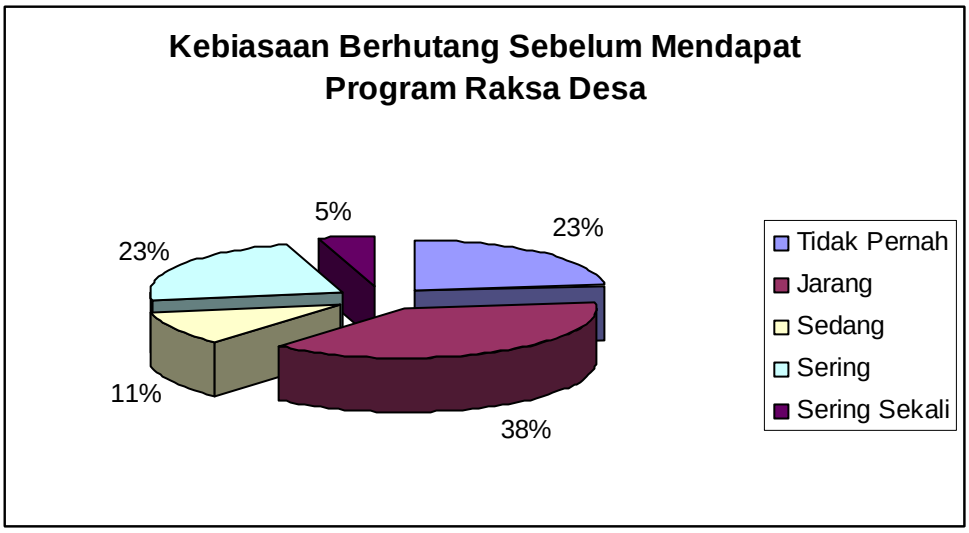

Dari grafik di atas terlihat bahwa sebelum mendapatkan bantuan Program Raksa Desa sebanyak 38% responden menyatakan jarang melakukan kebiasaan berhutang, sebanyak 23% menyatakan tidak pernah berhutang, sebanyak 23% juga menyatakan sering berhutang, sebanyak 11% menyatakan frekuensi yang sedang dalam kebiasaan berhutangnya dan sebanyak 5% menyatakan sering sekali berhutang.

Lalu grafik berikut menggambarkan kebiasaan tersebut setelah mendapatkan bantuan modal pinjaman melalui Program Raksa Desa.

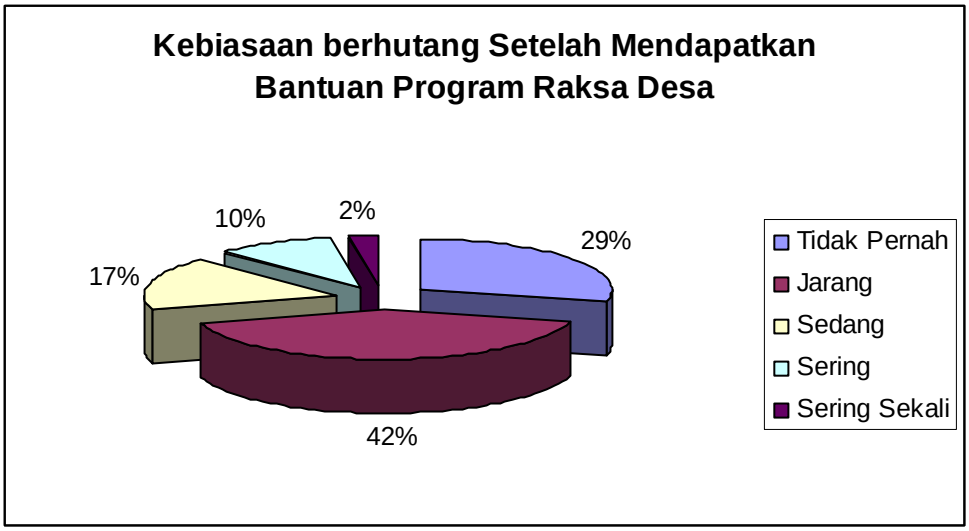

Dari grafik di atas kini tampak bahwa setelah mendapatkan bantuan Program Raksa Desa sebanyak 42% responden menyatakan jarang melakukan kebiasaan berhutang, sebanyak 29% menyatakan tidak pernah berhutang, sebanyak 10% juga menyatakan sering berhutang, sebanyak 17% menyatakan frekuensi yang sedang dalam kebiasaan berhutangnya dan sebanyak 2% menyatakan sering sekali berhutang.

Bila kita sandingkan grafik kebiasaan berhutang responden ketika sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan pinjaman modal Program Raksa Desa didaptakan gambaran sebagai berikut.

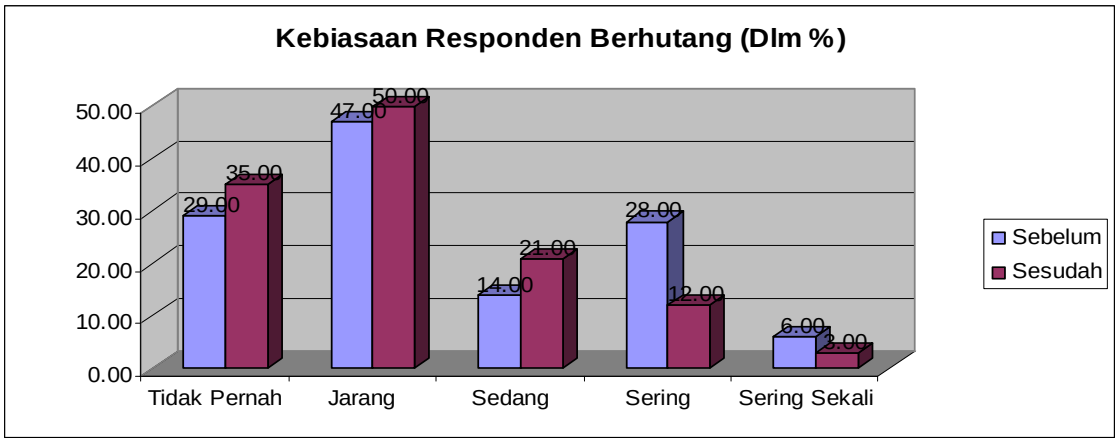

Grafik di atas menunjukkan kecenderungan untuk menurunnya kebiasaan berhutang dari responden setelah mereka mendapatkan bantuan pinjaman modal Program Raksa Desa.

Berikutnya akan ditampilkan gambaran dari kebiasaaan responden dalam menggadaikan/menjual barang ketika membutuhkan uang *cash*. Grafaik pertama ini menggambarkan kebiasaan dari responden untuk menggadaikan/menjual barang sebelum mendapatkan bantuan Program Raksa Desa

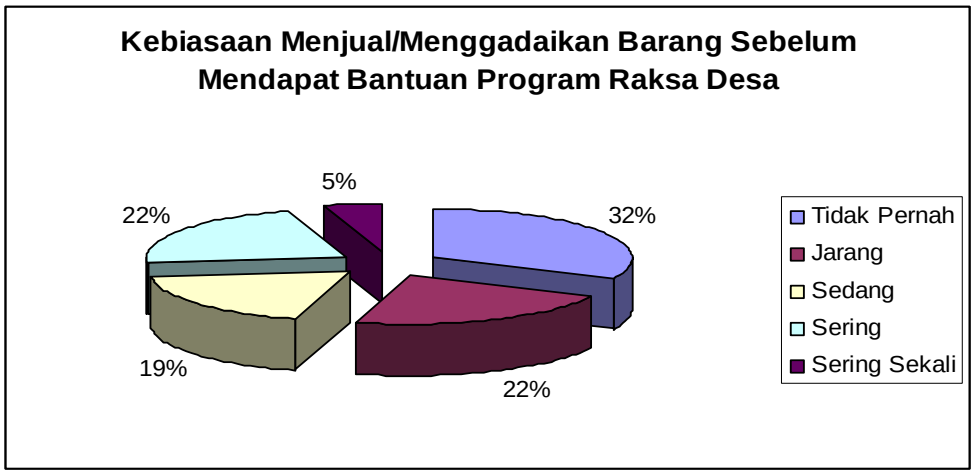

Grafik di atas memeperlihatkan bahwa sebanyak 32% dari responden menyatakan tidak pernah menggadaikan/menjual barang ketika menemukan keperlaun mendesak untuk mendapatkan *cash*, sebanyak 22 % sering menggadaikan/menjual barang, juga sebanyak 22% menyatakan jarang menggadaikan/menjual barang, sebanyak 19% menyatakan sedang-sedang saja dan sebanyak 5% menyatakan sering sekali menjual/menggadaikan barang manakala menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperoleh *cash*.

Lalu grafik berikut menggambarkan kebiasaan tersebut setelah mendapatkan bantuan modal pinjaman melalui Program Raksa Desa.

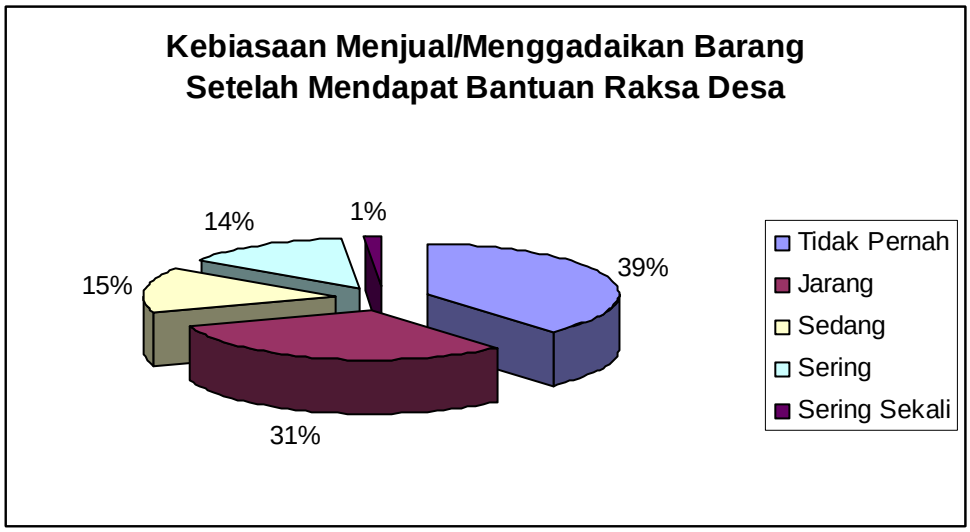

Kini grafik memeperlihatkan bahwa sebanyak 39% dari responden menyatakan tidak pernah menggadaikan/menjual barang ketika menemukan keperlaun mendesak untuk mendapatkan *cash*, sebanyak 14 % sering menggadaikan/menjual barang, juga sebanyak 31% menyatakan jarang menggadaikan/menjual barang, sebanyak 15% menyatakan sedang-sedang saja dan sebanyak 1% menyatakan sering sekali menjual/menggadaikan barang manakala menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperoleh *cash*.

Bila kita sandingkan grafik kebiasaan dari responden dalam menjual/menggadaikan barang ketika sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan pinjaman modal Program Raksa Desa didaptakan gambaran sebagai berikut.

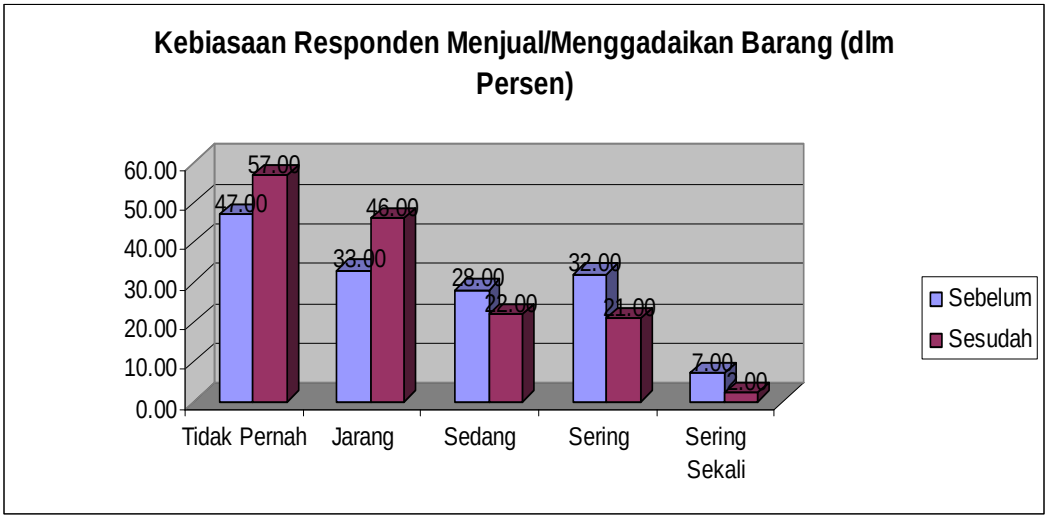

Grafik di atas menunjukkan kecenderungan menurunnya kebiasaan responden untuk menjual/menggadaikan barang manakala menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperoleh *cash*.

Dampak nyata dari adanya bantuan Program Raksa Desa adalah meningkatnya penghasilan rata-rata dari masyarakat desa penerima bantuan. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai rata-rata penghasilan responden sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan Program Raksa Desa yang dapat dilihat dari grafik berikut.

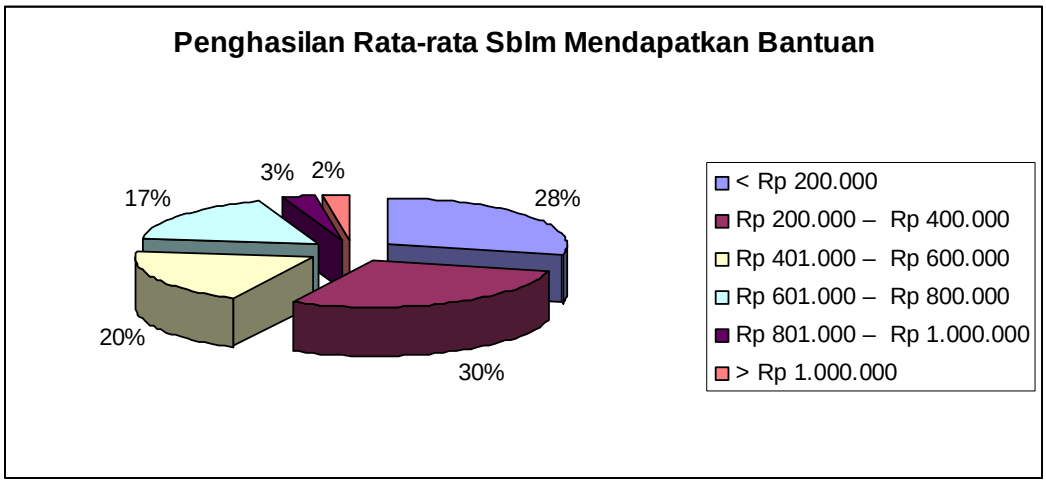

Grafik di atas menggambarkan penghasilan rata-rata dari responden sebelum mendapatkan bantuan. Ditunjukkan bahwa 30% responden memiliki pendapatan antara Rp 200.000 – Rp 400.000, sebanyak 28% responden memiliki pendapatan < Rp 200.000, sebanyak 20% responden memiliki pendapatan, antara Rp 401.000 – Rp 600.000, sebanyak 17% responden memiliki pendapatan antara Rp 601.000 – Rp 800.000, sebanyak 3% responden memiliki pendapatan antara Rp 801.000 – Rp 1.000.000 dan sebanyak 2% responden memiliki pendapatan lebih daripada Rp 1.000.000 per bulan.

Lalu bagaimana gambaran poenghasilan rata-rata responden setelah mendapatkan bantuan Program Raksa Desa, gambarannya dapat kita lihat pada grafik berikut.

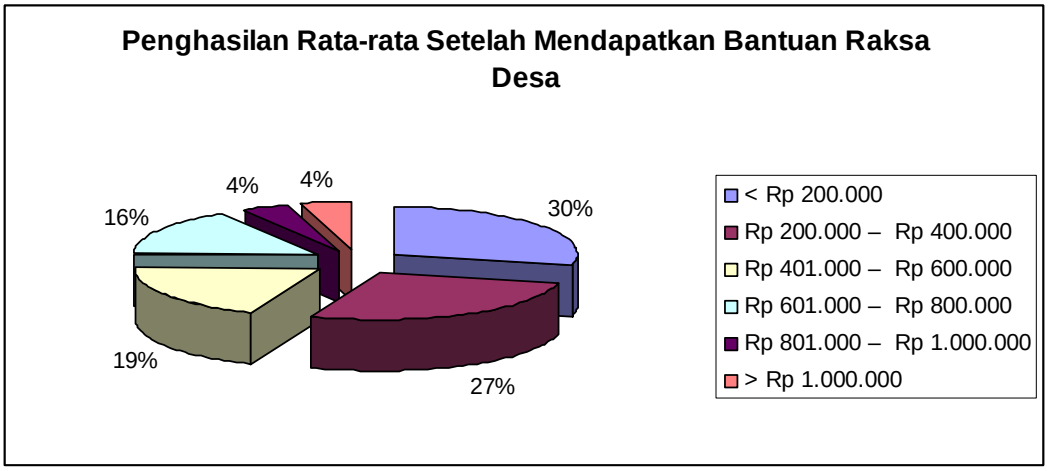

Grafik di atas menggambarkan penghasilan rata-rata dari responden sebelum mendapatkan bantuan. Ditunjukkan bahwa 27% responden memiliki pendapatan antara Rp 200.000 – Rp 400.000, sebanyak 30% responden memiliki pendapatan < Rp 200.000, sebanyak 19% responden memiliki pendapatan, antara Rp 401.000 – Rp 600.000, sebanyak 16% responden memiliki pendapatan antara Rp 601.000 – Rp 800.000, sebanyak 4% responden memiliki pendapatan antara Rp 801.000 – Rp 1.000.000 dan sebanyak 4% responden memiliki pendapatan lebih daripada Rp 1.000.000 per bulan.

Bila kita sandingkan grafik kebiasaan dari responden dalam menjual/menggadaikan barang ketika sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan pinjaman modal Program Raksa Desa didaptakan gambaran sebagai berikut.

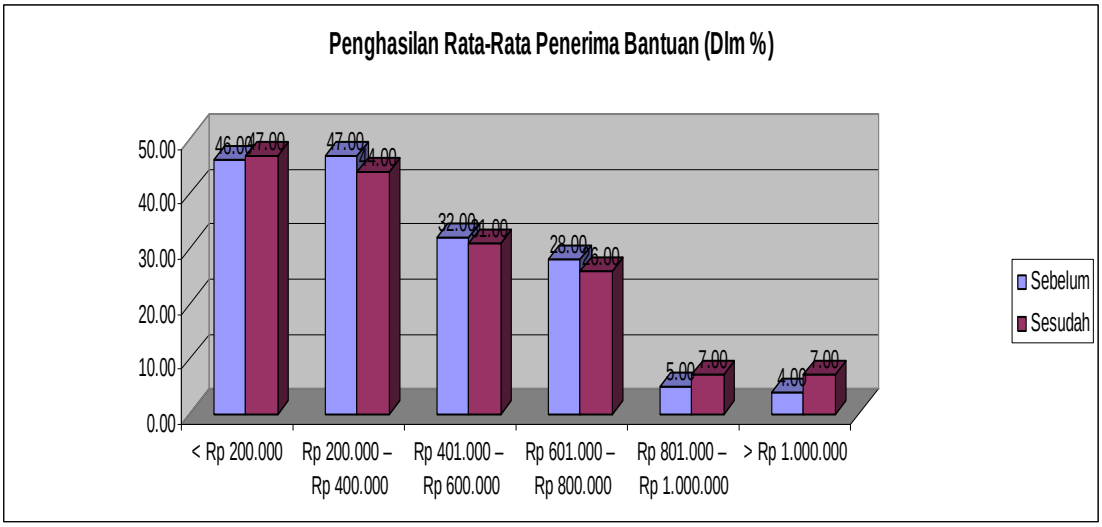

Grafik di atas menunjukkan kecenderungan tidak adanya perbedaan yang bebrarti dari rata-rata penghasilan responden baik sebelum maupun setelah mendapatkan batuan Program Raksa Desa.

Dampak terakhir yang ditelaah dalam penelitian ini adalah bagaimana Program Raksa Desa ini mampu menumbuhkan motivasi warga desa untuk tetap berusaha dan bekerja. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

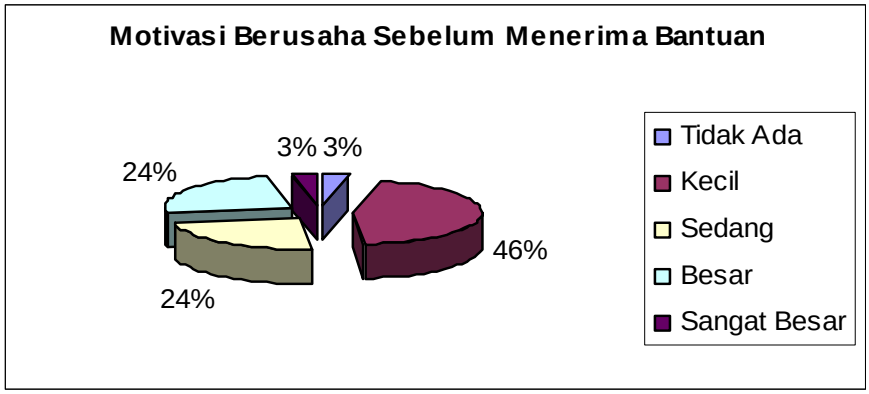

Grafik di atas menunjukkan bahwa ada 46% responden merasa memiliki motivasi yang kecil dalam berusaha sebelum Program raksa Desa ada dan ada 3% responden yang menyatakan tidak memiliki motivasi berusaha. Sementara responden yang menyatakan motivasi berusahanya sedang-sedang saja ada 24%, kemudian sebanyak 24% responden menyatakan memiliki motivasi yang besar, dan ada 3% dari responden yang menyatakan memiliki motivasi yang sangat besar dalam berusaha, sebelum mereka mendapatkan Program Raksa Desa.

Grafik berikutnya adalah setelah responden mendapatkan Program Raksa Desa, hasilnya adalah sebagai berikut.

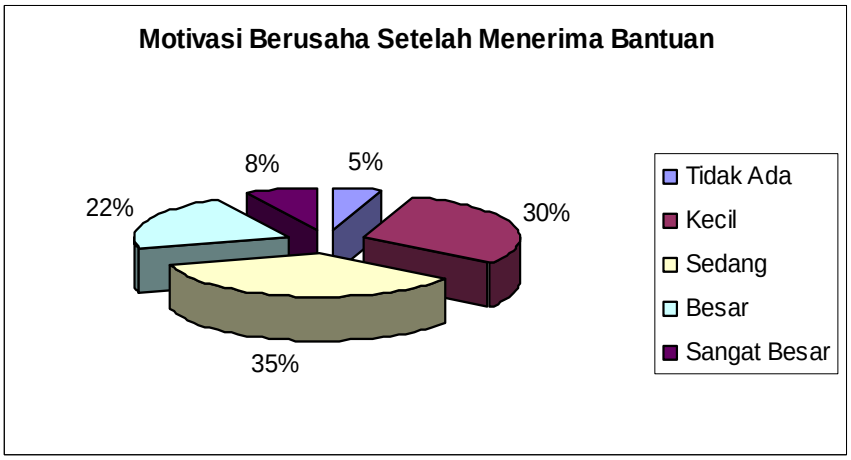

Kini responden yang merasa memiliki motivasi kecil dalam berusaha menjadi sebanyak 30%, responden menyatakan tidak memiliki motivasi menjadi 5%, responden yang menyatakan memiliki motivasi yang sedang-sedang saja menjadi sebanyak 35%, responden yang menyatakan memiliki motivasi yang besar

ada 22% dan responden yang menyatakan memiliki motivasi yang sangat besar ada 8%.

Bila kita sandingkan grafik motivasi dari responden dalam berusaha baik sebelum maupuns setelah mendapaatkan bantuan Program Raksa Desa maka diperoleh gambaran sebagai berikut.

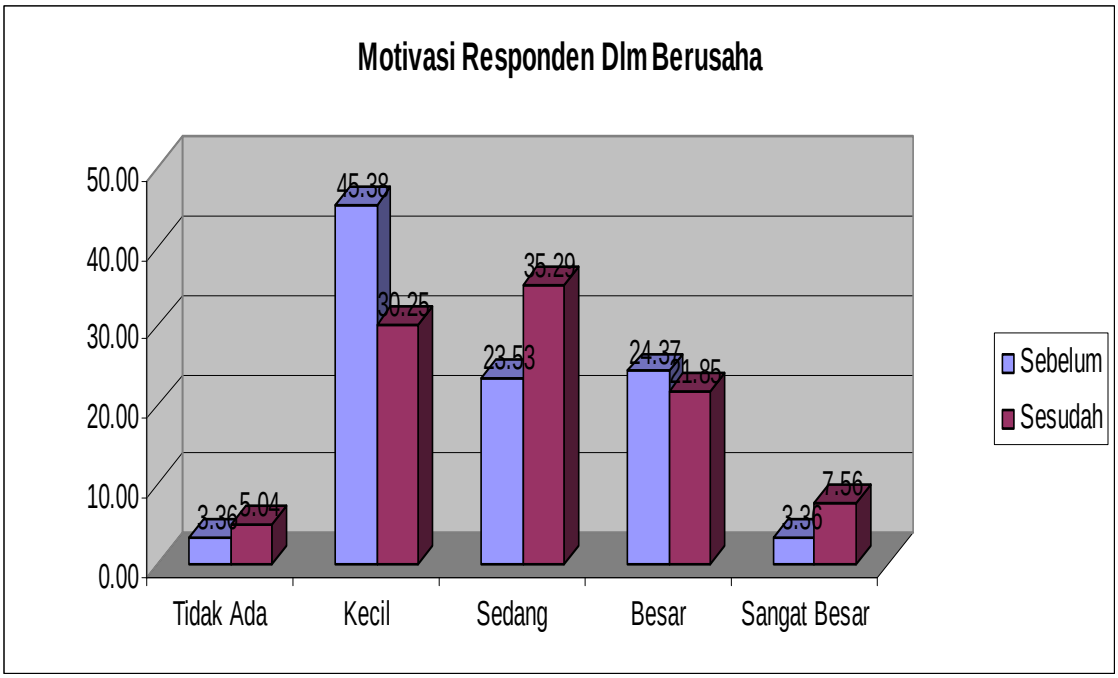

Dari grafik di atas terlihat adanya kecenderungan meningkatnya motivasi berusaha dari responden setelah mereka mendapatkan bantuan Program Raksa Desa. Yang tidak ada dan kecil motivasinya jumlahnya turun dan yang sdang serta sangat besar motivasinya bertambah persentasenya.

4.2. Analisis Temuan Penelitian

4.2.1. Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Raksa Desa untuk Peningkatan Perekonomian Perdesaan

Pada awalnya Program Raksa Desa diselenggarakan dengan maksud untuk mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara memberdayakan pemerintah dan masyarakat desa melalui pendayagunaan

sumberdaya lokal secara mandiri dan sumberdaya pembangunan secara optimal. Sehingga tujuan yang ingin dicapai program ini adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perdesaan serta meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan melalui penyediaan permodalan bagi kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Pada bagian ini akan dianalisis efektivitas mekanisme penyaluran dana Raksa Desa. Analisis pertama terkait dengan bagaimana kesiapan dan pemahaman masyarakat mengenai program ini. Tujuan program Raksa Desa dapat tercapai hanya apabila masyarakat selaku sasaran dan pelaku program ini mengetahui tujuan, prosedur, *output* serta *outcome* yang ingin dicapai padai akhir pelaksanaan program dengan baik. Langkah awal menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang program ini adalah mensosialisasikan program beberapa waktu sebelum program ini dilaksanakan. Bila mengacu pada hasil temuan seperti pada grafik yang telah ditampilkan di atas, kegiatan sosialisasi tampaknya sudah cukup baik dilaksanakan hal itu dapat dilihat dari data bahwa lebih dari 90% responden menyatakan mengetahui mengenai Program Raksa Desa pada saat sebelum program berjalan.

Namun sosialisasi itu tampaknya baru sekilas saja, maksudnya adalah bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar dan mengerti arah pelaksnaan program Raksa Desa. Sebagaimana telah ditetapkan bahwa bantuan modal yang besarnya 60% dari total bantuan merupakan dana bergulir yang bersifat pinjaman, dimana mereka yang pertama kali menerima pinjaman modal dapat mengembalikan pinjaman agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang lain di masa mendatang. Meskipun di beberapa desa pada awalnya kesadaran untuk mencicil pinjaman berjalan sesuai dengan rencana akan tetapi pada perkembangan selanjutnya hampir di seluruh desa dari tahun ke tahun proses pengembalian dana pinjaman tersebut macet. Hal ini umumnya disebabkan adanya informasi yang keliru bahwa bantuan dana ini bersifat hibah sehingga tidak perlu untuk dikembalikan.

Pada bagian deskripsi di atas ditunjukkan bahwa motivasi responden untuk mencicil pinjaman rendah, sebanyak 44% responden menyatakan cukup malas untuk mencicil modal utang pinjaman modal dan sebanyak 26% menyatakan sangat malas dalam mencicil pinjaman. Akibatnya bisa dilihat pada variabel benefit dari program dimana sebanyak 56% responden menyatakan tidak ada pernambahan jumlah kelompok masyarakat yang menerima perguliran Program Raksa Desa dan hanya 39% responden menyatakan ada penambahan jumlah kelompok masyarakat yang menerima perguliran Program Raksa Desa. Kembali kepada persoalan macetnya motivasi mencicil, bila ditelusuri lebih mendalam keengganan untuk mencicil ini muncul dari luar, motifnya bisa bermacam-macam, mulai dari penggembosan oleh para "oposan desa", hingga kekeliruan menafsirkan berita di media massa. Padahal potensi untuk mau mencicil itu ada, terbukti di tahap-tahap awal, sebagian besar para penerima bantuan dana itu mau mencicil, artinya diperlukan pendekatan yang lebih tepat untuk menyadarkan para peminjam awal bahwa dana tersebut bersifat bergulir.

Upaya menumbuhkan kesadaran warga untuk mencicil pinjaman tersebut dapat berhasil apabila ada sinergitas kerja antara Satlak, sarjana pendamping, tokoh masyarakat dan aparatur desa.

Hal kedua yang menjadi temuan signifikan adalah berkenaan dengan besar atau nilai nominal modal pinjaman yang diterima masyarakat. Dari statistik deskriptif di atas disampaikan bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 57% responden menerima bantuan sebesar antara Rp 100.000 – Rp 250.000, dan hanya 8% responden mendapatkan modal pinjaman sebesar lebih dari Rp 500.000. Secara nominal nilai antara Rp 100.000 – Rp 250.000 cukup kecil untuk dapat mengakselerasi penambahan laba usaha. Dari beberapa kasus nominal pinjaman di bawah satu juta ternyata tidak cukup untuk memperkuat modal usaha apalagi untuk memulai usaha baru, dan biasanya habis untuk keperluan hidup (*"risiko"*) sehari-hari. Di salah satu desa di Kabupaten Bandung dana bergulir yang diharapkan berkembang akhirnya hanya berupa *sawer* bagi warga dan rata-rata warga menerima antara 250 s.d 100 ribu/orang. Alhasil tak jauh berbeda dengan

BLT yang dianggap sebagai hibah untuk kepedulian pemerintah pusat bagi warga di daerah.

Memang apabila dilihat dari jenis kegiatan ekonomi yang dibiayai program Raksa Desa dimana berdasarkan temuan penelitian menunjukkan mayoritas jenis usaha yang dikembangkan adalah perdagangan yaitu 29%, kemudian sebanyak 15% untuk bidang industri kecil/rumah tangga, 14% untuk bidang pertanian, 13% untuk bidang peternakan, 9% untuk bidang jasa angkutan umum, 7% untuk bidang perbengkelan, 6% untuk bidang konveksi/penjahit/bordir, 5% untuk bidang pertukangan dan jasa lainnya dan 2% untuk bidang mebel, maka nilai nominal tersebut sulit untuk memberikan penambahan laba usaha yang cukup signifikan dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

Sementara apabila dianalisis dari sisi sasaran masyarakat yang menerima bantuan dimana hasil penelitian mempeoleh gambaran bahwa 45% sasaran bantuan ekonomi adalah kepada kelompok masyarakat miskin produktif sedangkan masyarakat miskin nonproduktif sebanyak 40%. Dari sisi kemungkinan keberhasilan perguliran dana bantuan komposisi ini secara teoretis cukup optimistik mengingat masyarakat miskin produktif berpeluang untuk dapat menggulirkan dananya, namun demikian masih perlu dikaji kembali bagaimana perlakuan atau strategi yang mesti diterapkan kepada kelompok masyarakat miskin nonproduktif.

Memang lebih logis apabila dana pinjaman bergulir lebih diprioritaskan kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha, namun masyarakat yang miskin tidak memiliki potensi keahlian berusaha pun seharusnya mendapat bantuan pinjaman dana usaha. Apabila alasan mereka tidak mendapatkan prioritas adalah kekhawatiran apabila mereka tidak dapat membayar cicilan, tetapi ternyata bahkan mereka yang termasuk produktif pun akhirnya tidak membayar cicilan juga. Sehingga ada kecenderungan yang miskin dan nonproduktif makin tenggelam dalam kemiskinannya.

Hasil pengamatan penelitian juga mendapati bahwa di beberapa lokasi muncul kecemburuan dari masyarakat yang belum menerima perguliran dana

bantuan, salah satu temuan mengenai respons masyarakat yang tidak atau belum menerima dana bantuan adalah dengan melakukan pemboikotan untuk tidak membayar PBB.

Dengan demikian salah satu faktor krusial dalam mekanisme penyaluran dana bantuan Program Raksa Desa adalah berkenaan dengan kriteria penentuan masyarakat penerima bantuan pinjaman dana bergulir. Sebagai bahan pertimbangan, program Raksa Desa harus belajar kepada program BLT/SLT dalam hal penentuan sasaran penerima bantuan, dimana kriteria-kriteria penerima bantuan secara teoretis seringkali tidak cukup operasional diterapkan di lapangan, artinya perlu dikaji lagi secara seksama penggunaan kriteria penerima bantuan Program Raksa Desa agar tidak serta merta meniru kriteria penerima bantuan program BLT/SLT.

4.2.2. Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Raksa Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Berdasarkan pengamatan 67% responden menyatakan bahwa infrastruktur fisik yang dibangun melalui bantuan prograam Raksa Desa adalah rehabilitasi jalan desa, selanjutnya sebanyak 14% untuk merehabilitasi sarana MCK, dan 13% digunakan untuk memperbaiki gorong-gorong serta sebanyak 6% menggunakannya untuk pembangunan jembatan. Hampir seluruhnya atau lebih dari 80% penyaluran dana bantuan program Raksa Desa menurut pengamatan responden dan berdasarkan data sekunder di Satlak Fisik berhasil dalam arti sesuai dengan perencanaan.

Manfaat dari rehabilitasi infrastruktur transportasi sangat terasa dalam meningkatkan kemudahan masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah dan aktivitas sosial lainnya. Sebanyak 60% responden menyatakan aksesibilitas transportasi menjadi lebih mudah setelah fasilitas infrastruktur dibangun, 25% menyatakan menjadi mudah, 8% menyatakan menjadi sangat mudah dan sebanyak 7% menyatakan tidak ada perubahan kemudahan aksesibilitas sekaalipun fasilitas

telah dibangun. Selain itu 72% responden menyatakan bahwa tempat tinggalnya menjadi tidak terpencil setelah dibangun infrastruktur penunjang sebagai hasil dari Program Raksa Desa. Dampak dari perbaikan infrastruktur jalan dapat dilihat dari pernyataan responden sebanyak 30% yang memiliki motivasi besar untuk berusaha setelah adanya perbaikan infrastruktur fisik.

Mengingat nominal bantuan uang untuk bidang fisik ini hanya 40% dari total bantuan program Raksa Desa maka dalam pengerjaan bidang ditunjang dengan sumber dana penyertaan yang datangnya dari swadaya masyarakat, jenis swadaya masyarakat ini bisa berupa uang, sumbangan berupa bahan bagunan, atau bisa berupa bantuan tenaga kerja yang biasanya dilakukan secara bergotong royong. Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana yang telah disebutkan di atas sebanyak 72% responden menyatakan bahwa besaran swadaya masyarakat senilai kurang dari satu juta rupiah, selanjutnya 23% senilai antara Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 ada, 4% memberikan swadaya senilai antara Rp 1.501.000 – Rp 2.000.000, dan sebanyak 1% memberikan swadaya lebih besar daripada Rp.2 juta.
Keberhasilan penggunaan dana Raksa Desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan ditunjang antara lain oleh keterlibatan dan partisipasi masyarakat sejak dari tahapperencanaan hingga tahap pelaksanaan. Hal ini terlihat dari hasil temuan yang menyatakan bahwa sebanyak 42% responden menyatakan pernah menghadiri pertemuan kelompok dalam implementasi pembangunan infrastruktur fisik dan ada 28% responden menyatakan sering menghadiri pertemuan kelompok, 18% menyatakan frekuensinya dalam menghadiri pertemuan kelompok adalah sedang-sedang saja, 7% menyatakaan sering menghadiri pertemuan kelompok dan sebanyak 5% menyatakan belum pernah menghadiri pertemuan kelompok. Selain itu partisipasi masyarakat yang tinggi dalam memberikan usul dan pendapat juga menjadikan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan berjalan efektif.

Keefektivitasan pemanfaatan dana untuk pembangunan infrastruktur perdesaan dimungkinkan karena pembangunan infrastruktur atau fisik adalah pembangunan yang hasilnya dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Dalam penggunaan bahan-bahan untuk kegiatan pembangunannya pun dengan mudah

dapat dikalkulasikan sehingga prosesnya dapat diawasi secara langsung oleh berbagai *stakeholders* terkait, terutama oleh masyarakat setempat.

4.2.3. Analisis Efektivitas Pemanfaatan Dana Raksa Desa terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat Desa

Bila kita runut kembali bahwa maksud dari program Raksa Desa adalah untuk mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan. Melalui program ini pemerintah dan masyarakat desa diberdayakan melalui pendayagunaan sumberdaya lokal secara mandiri dan sumber daya pembangunan secara optimal. Untuk memberdayakan masyarakat miskin di perdesaan bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan, banyak kendala dan masalah yang dihadapi.

Bila kita lihat hasil penelitian yang terkait dengan daya beli masyarakat desa, penelitian ini mendapatkan temuan bahwa responden cenderung menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang bebrarti dari rata-rata penghasilan responden baik sebelum maupun setelah mendapatkan batuan Program Raksa Desa. Hal tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut.

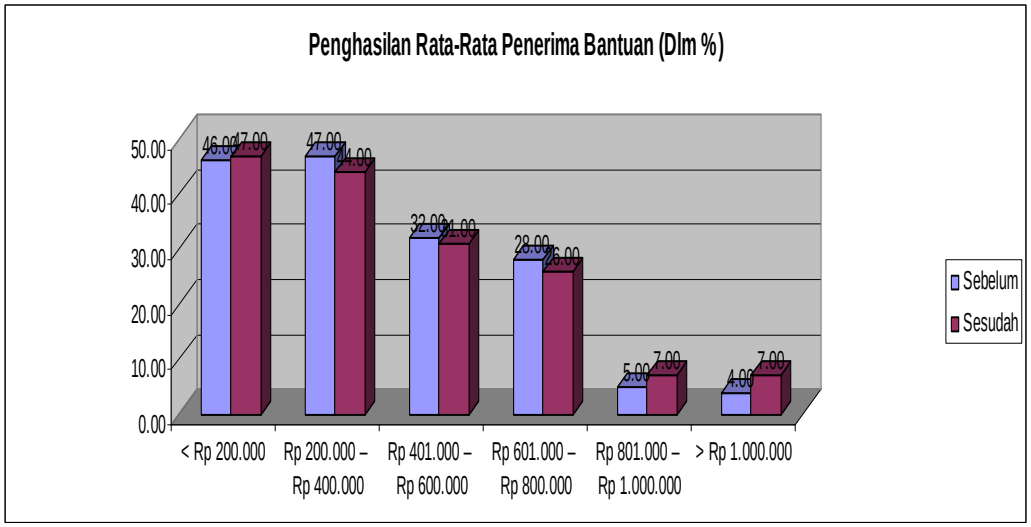

Secara teoretis juga tidak memadai apabila daya beli selaku variabel dependen memiliki korelasi yang signifikan hanya semata-mata dengan

menghubungkannya dengan program Raksa Desa. Agak sulit membuktikan secara faktual bahwa program Raksa Desa menjadi terminan peningkatan daya beli masyarakat. Sebagai variabel dependen daya beli memiliki hubungan multivariat dimana terdapat beberapa variabel yang mempengaruhinya, bahkan determinan utama daya beli seringkali bersifat makro, seperti masalah inflasi, adanya krisis ekonomi, meningkatnya kenaikan harga BBM dan Sembako. Jadi sekali lagi terlalu berlebihan apabila secara pasti mengharapkan peningkatan daya beli masyarakat perdesaan semata-mata melalui adanya program Raksa Desa.

Seperti program-program yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan lainnya seperti BLT/SLT atau P2KP, maka program Raksa Desa tidak akan mampu mengatasi masalah kemiskinan secara instan. Bahkan bila merujuk kepada statistik dan melalui indikator kemiskinan sebagaimana yang direkomendasikan Kimpraswil pada program BLT maka kian hari angka kemiskinan cenderung bertambah, padahal sudah ada beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah diterapkan. Tetapi karena pemberian bantuan pada program-program tersebut terkadang *overlaping* dan bersifat parsial serta kurangnya kordinasi pelaksana, dan rendahnya partisipasi masyarakat maka program-program tersebut kurang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan.

Kembali kepada analisis bagaimana determinasi program Raksa Desa terhadap peningkatan daya beli masyarakat desa. Bila daya beli dapat diasosiasikan dengan kemiskinan, maka akan dianalisis masalah tidak signifikannya peningkatan daya beli responden penelitiaan ini sekalipun telah dibantu dengan program Raksa Desa. Pada tinjauan pustaka disebutkan bahwa masyarakat miskin tetap menjadi miskin karena ketidakberdayaan dan keterdiaman kelompok miskin itu sendiri, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan budaya. Dari segi ekonomi penyebab ketidakberdayaan dan keterdiaman ada tiga, yaitu: (a) terhambatnya mobilitas sosial ke atas; (b) rendahnya partisipasi dalam penentuan kebijakan publik; dan (c) rendahnya keterlibatan dalam kegiatan ekonomi.

Hasil penelitian mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik dapat dilihat kembali melalui grafik-grafik berikut.

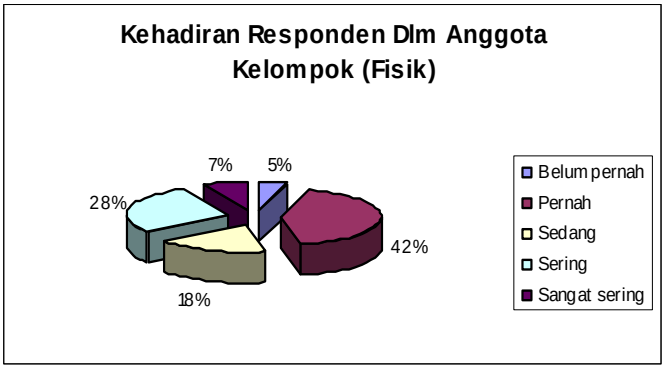

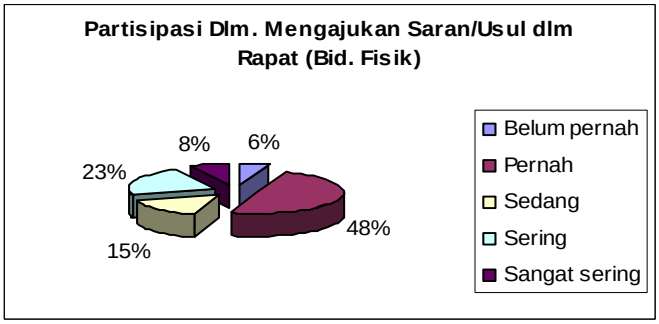

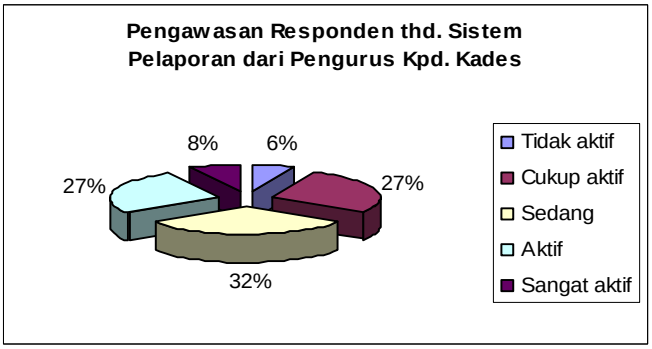

Terlihat bahwa tingkat partisipasi responden dari ketiga kegiatan (untuk bidang fisik) di atas masih belum optimal range frekuensi dan tingkat keatifan masih di bawah 50%. Sementara tingkat partisipasi untuk bidang ekonomi juga tidak jauh berbeda.

Meskipun program Raksa Desa belum mampu meningkatkan daya beli secara berarti namun program ini memberi manfaat yang berarti bagi masyarakat. Antuiasme masyarakat demikian besar terhadap program ini, hal ini dapat dilihat

dari meningkataknya motivasi masyarakat untuk berusaha setelah mendapatkan bantuan program ini.

Disamping itu keuntungan yang diperoleh masyarakat penerima bantuan pinjaman modal juga terlihat dari pernyataan 82% responden yang menyatakan ada pertambahan laba setelah mendapatkan bantuan, dan ada 63% responden menyatakan bahwa produksinya bertambah. Disamping itu sebanyak 57% responden menyatakan bahwa ada peningkatan jumlah tenaga kerja dan sebanyak 43% menyatakan tidak ada penambahan dan tidak ada yang menyatakan adanya pengurangan tenaga kerja (PHK) pasca Program Raksa Desa.

Hal terpenting yang patut menjadi pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan program Raksa Desa adalah bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya program ini adalah menurunnya kebiasaan berhutang dari masyarakat. Kalau sebelum mendapatkan bantuan Program Raksa Desa sebanyak 38% responden menyatakan jarang melakukan kebiasaan berhutang, sebanyak 23% menyatakan tidak pernah berhutang, sebanyak 23% juga menyatakan sering berhutang, sebanyak 11% menyatakan frekuensi yang sedang dalam kebiasaan berhutangnya dan sebanyak 5% menyatakan sering sekali berhutang. Maka setelah mendapatkan bantuan ada sebanyak 42% responden menyatakan jarang melakukan kebiasaan berhutang, sebanyak 29% menyatakan tidak pernah berhutang, sebanyak 10% juga menyatakan sering berhutang, sebanyak 17% menyatakan frekuensi yang sedang dalam kebiasaan berhutangnya dan sebanyak 2% menyatakan sering sekali berhutang.

Disamping kebiasaan berhutang, kebiasaan untuk menjual atau menggadaikan barang manakala ada keperluan mendesak juga menunjukkan penurunan antara sebelum maupun setelah mendapatkan bantuan program Raksa Desa.

BAB

5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pogram Raksa Desa walaupun secara umum dan global memberikan hasil yang cukup menggembirakan, namun tidak luput dari kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain sebagai berikut. *Pertama*, meskipun jumlahnya sedikit tetapi masih ada kasus penyelewengan dana program Raksa Desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. *Kedua*, belum optimalnya sosialisasi dan penyamaan persepsi antara pemerintah provinsi daan masyarakat pada umumnya mengenai tujuan dan sasaran program ini. Disamping itu kontrol, dan pendampingan yang belum optimal. *Ketiga* bantuan uang semata bukan obat mujarab untuk membangun ekonomi masyarakat. Namun yang terpenting tumbuhnya kesadaran dari elite masyarakat perdesaan untuk kembali menumbuhkan kegotongroyongan sehingga tidak ada lagi kecemburuan akibat kucuran bantuan yang dikuasai oleh ikatan kekerabatan (*sedulur/umpi*) yang dominan (elite), namun tidak mewujud dalam bentuk komunitas yang mementingkan kemajuan bersama.

2. Peran sarjana pendamping sangat menentukan keberhasilan program Raksa Desa, sayangnya pembinaan antara pendamping dengan masyarakat dan pembinaan pemerintah provinsi terhadap pendamping belum berkesinambungan. Salah satu pembeda antara desa yang berhasil dan kurang berhasil dalam program Raksa Desa adalah keaktifan dan kinerja sarjana pendamping tersebut. Sarjana Pendamping sangat dibutuhkan pada saat masyarakat mengajukan dana, menyusun rencana usaha, menguji kelayakan dan kemampuan membayar dari calon penerima, pada aspek produksi dan pemasaran hasil usaha.
3. Kegiatan evaluasi dan pemanatauan masih kurang, selayaknya kegiatan ini dilakukan setiap tahun dan dilakukan secara berkesinambungan.
4. Dominasi unsur birokrasi desa dalam pelaksanaan program Raksa Desa masih besar, sementara partispasi masyarakat masih rendah. Kendalanya adalah karena kurangnya akses masyarakat terhadap pengetahuan dan penyadaran politik.
5. Untuk bidang bantuan perekonomian penggunaan dana Raksa Desa untuk untuk bidang ini belum tepat sasaran. Dari sisi penerima, masih dominan masyarakat miskin yang produktif, seharusnya balance antara masyarakat miskin produktif dan nonproduktif. Selain itu sasaran perguliran dana pinjaman tidak tercapai karena adanya salah persepsi warga terhadap mekanisme dan tujuan program ini.
6. Efektivitas penggunaan dana Raksa Desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan telah tepat sasaran dan berhasil.
7. Sementara pemanfaatan dana Raksa Desa terhadap peningkatan daya beli masyarakat desa belum tercapai bila merujuk kepada pernyataan responden bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penghasilan rata-rata sebulan antara sebelum dan sesudah mendapatkan program bantuan Raksa Desa. Namun demikian dampak program Raksa Desa cukup positif terhadap

pengurangan kebiasaan berhutang dan kebiasaan menjual/menggadaikan barang manakala masyarakaat memerlukan uang.

8. Program Raksa Desa dapat dilanjutkan dengan catatan harus memperbaiki kekurangan di masa lalu.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Mendaftar ulang para sarjana pendamping, kemudian melakukan diskusi mendalam dengan para pendamping mengenai kemungkinan rencana program serupa dengan program Raksa Desa di masa mendatang. Selanjutnya para sarjana pendamping ini perlu ditingkatkan kompetensinya terutama dalam hal *Community based development*. Tidak lupa memberikan penghargaan kepada para sarjana pendamping yang telah berhasil mengemban tugasnya.
2. Dibandingkan dengan bidang pembangunan infrastruktur fisik bidang peningkatan perekonomian masih belum optimal, untuk itu dalam menentukan sasaran penerima bantuan ekonomi perlu dikaji dengan seksama siapa saja dan apa saja kriterianya, dipertimbangkan juga bagi masyarakt miskin non produktif untuk dapat mengakses bantuan tersebut.
3. Membentuk sistem atau lembaga kontrol dikalangan publik yang *independent* terhadap program Raksa Desa, agar program dapat berjalan secara efektif dan efisien.
4. Untuk mengatasi masalah kemacetan perguliran dana pinjaman, perlu dikaji lagi teknis pelaksanaannya, misalnya pengaturan tentang nilai nominal bantuan daan masa perguliran. Perlu dikaji berapa nilai optimal untuk besarnya nilai bantuan pinjaman dan batas waktu optimal perguliran dana. Tak lupa dicari mekanisme *punishment* dan *reward* dalam hal ini.

5. Pilihan bidang usaha atau cara berusaha perlu dikaji lebih mendalam, apakah lebih efektif bila disalurkan pada level individu atau kelompok seperti misaalnyaa bagi desa-desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang cukup prospektif sehingga bisa memanfaatkan untuk penambahan modal.
6. Program Raksa Desa perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan terutama lembaga pemerintah terkait, sehingga mereka dapat mendukung dan sinergi dalam menyukseskan program ini. Keberhasilan program ini perlu didorong sehingga proses perbaikan harus terus dilakukan, harapannya semakin hari program ini dapat memenuhi sasaran untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat perdesaan di Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Eriyanto. 2007. *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*. LkiS. Yogyakarta.

Rustiny, Elly. 2005. *Kajian Tentang Program Raksa Desa di Kabupaten Sumedang Sebagai Implementasi Kebijakan Tugas Pembantuan dari Provinsi Kepada Desa di Provinsi Jawa Barat*. Tesis Magister Studi Pembangunan ITB.

Sadu Wasistiono, 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Edisi Ketiga. Penerbit Fokusmedia, Bandung.

Santoso, Singgih. 1999. *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Terry, George R, 1960. *Principles of Management*. Thrid Edition. Richard D. Irwin Inc. Homewood Illinois.

Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera